

**100 TAHUN KARYA SVD DI INDONESIA:
KONTEKS, KESUKSESAN, KEGAGALAN, MAKNA
DAN RETROSPEKSI HISTORIS UNTUK SVD DI MASA DEPAN
(Sub Tema: Provinsi SVD Ende)¹
Oleh: Antonio Camnahas SVD**

1. Pendahuluan

Setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah selalu memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Tidak ada satu peristiwa pun yang ada untuk dirinya sendiri. Karena itu, guna memahami satu peristiwa masa kini, orang diajak untuk “menoleh” ke belakang. Tahun ini (2013), tepatnya 1 Maret yang lalu, kongregasi SVD di Indonesia telah mengukir sejarah lewat momentum ulang tahun kehadirannya yang ke-100. Peristiwa yang saya sebut dengan nama “Peristiwa 2013” SVD di Indonesia ini tentu saja memantik tanya dalam hati orang, baik dalam hati orang-orang SVD sendiri maupun orang-orang lain, misalnya tentang apa saja yang sudah terjadi (kesuksesan dan kegagalan) sepanjang usia sentensial ini dan apa yang masih bisa dibuat di masa-masa yang akan datang.

Demi memperoleh “gambar” yang lebih jelas, fokus “lensa” tulisan ini akan diarahkan lebih sering ke ruang “geografis” Provinsi SVD Ende. Wilayah-wilayah lain di Indonesia akan disorot sejauh dibutuhkan. Tulisan yang dibuat dalam rangka memaknai “Peristiwa 2013” ini, akan dibagi ke dalam lima bagian utama, yaitu: konteks historis, kesuksesan para misionaris SVD, kegagalan-kegagalan, makna historis, dan retrospeksi untuk berlangkah ke depan. Dalam satu karya sejarah, konteks historis itu berperan penting untuk memberi penjelasan terhadap “teks” dan dengan itu hubungan antar “teks” (= peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa kini) bisa dilihat lebih jelas. Pada tempat kedua, akan dibahas beberapa karya monumental (yang penulis sebut sebagai kesuksesan) yang dianggap cukup mewakili kehadiran SVD selama masa 100 tahun ini. Kemudian, setelah kesuksesan-kesuksesan yang ada dilihat, penulis akan membahas satu-dua kegagalan SVD dalam karya misinya dan makna historis dari sejarah ini. Tulisan ini akan diakhiri dengan satu-dua retrospeksi historis dengan maksud untuk menentukan titik pijak dan menemukan pegangan bagi perjalanan SVD Indonesia umumnya dan SVD Provinsi Ende khususnya di masa depan.

Proses pengerjaan tulisan ini didukung dengan beberapa metode sekaligus, seperti penelitian kepustakaan, penelitian arsip (dokumen, catatan, arsip audio-visual) dan wawancara lisan dengan tokoh tertentu. Semua data sejarah yang diperoleh dari metode-metode ini menolong penulis merampungkan tulisan ini.

2. Konteks Historis

2.1. Perang Dunia I dan II

Ada beberapa konteks penting yang menandai karya misi SVD di awal abad ke-20. Dua peristiwa besar yang punya dampak global yakni kedua Perang Dunia (1914-1918 dan 1939-1945). Kedua

¹ Tulisan ini pernah dibawakan sebagai salah satu makalah dalam seminar sehari di Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero dalam rangka 100 Tahun SVD di Indonesia, Jumat, 6 September 2013. Pemakalah lainnya yang hadir dalam seminar ini adalah Bapak Ben Mboi (Gubernur III NTT periode 1978-1988), Francisia SSE Seda, Ph.D (dosen Departemen Sosiologi FISIP-Universitas Indonesia), P. Dr. Lukas Jua SVD, dan P. Hubert Thomas Hasulie, MA, SVD.

perang ini masing-masing punya dampak negatif dan positifnya sendiri terhadap karya misi di Sunda Kecil.

Pada Perang Dunia I banyak misionaris yang dilibatkan dalam perang, dan karena itu tidak bisa dikirim ke tanah misi. Padahal waktu itu SVD baru saja memulai karyanya di wilayah Sunda Kecil dengan janji akan segera mengirim misionaris untuk menggantikan para imam Jesuit. Selain itu, pasca perang, ada satu pandemi penyakit yang dikenal dengan nama flu Spanyol², di mana Flores juga terkena imbasnya. Dalam tempo singkat, empat orang misionaris terbaik Larantuka mesti meninggal dunia karena serangan penyakit ini. Yang jatuh korban adalah: Br. Vincentius Meekes SVD, P. Karsten SVD, P. Wilhem Baack SVD dan P. Van der Velden SJ, juga 3 orang guru dan 20 orang murid. Kendatipun demikian, Perang Dunia I ternyata membawa berkat untuk misi. Karena diusir dari Togo dan Mosambik, 25 tenaga misionaris akhirnya melamar ke misi Sunda Kecil. Mereka ini yang kemudian bekerja dengan sangat berhasil di Hindia Belanda berbekalkan pengalaman pastoral di tempat misi mereka sebelumnya.

Ketika Perang Dunia II meletus, sekali lagi misi Sunda Kecil mesti menderita kekurangan tenaga pastoral. Jepang yang adalah sekutu Jerman, ketika menguasai Flores, menawan dan kemudian mengasingkan banyak misionaris Belanda ke Sulawesi. Banyak paroki ketiadaan gembala tanpa kepastian kapan para gembala itu akan kembali. Yang diizinkan tinggal di Flores hanya Mgr. Henricus Leven dan sekretarisnya, P. Johannes van der Heyden, P. Frans Cornelissen untuk seminari Mataloko, P. Jacobus Koemeester untuk Ledalero, ditambah dengan Br. Gallus dan Br. Vitalis Vermeule yang sudah tua dan sedang sakit. Tiga pastor Jerman yang sudah lanjut usia juga diizinkan tinggal yakni P. Mertens, P. Lambert dan P. Suntrup. Tenaga-tenaga pastoral ini diperkuat dengan beberapa imam pribumi yang baru saja ditahbiskan yakni P. Gabriel Manek, P. Karolus Kale Bale, P. Yan Bala Letor, dan P. Rofinus Pedrico. Beberapa misionaris yang berasal dari negara yang tidak bermusuhan dengan Jepang juga diizinkan tinggal. Mereka adalah Br. Viktor (Austria), Br. Adjutor (Swiss), Br. Sebastian (Slowakia). Selain yang disebutkan di atas, semuanya mesti diasingkan ke Sulawesi (77 imam dan 20 bruder). Dengan demikian, umat Allah dari bagian timur sampai barat Flores yang waktu itu berjumlah lebih dari 330.000 hanya dilayani oleh beberapa pastor di atas.³ Selain itu, dalam perang ini juga, ada satu peristiwa naas yakni karamnya kapal “*van Imhoff*” di perairan dekat pulau Nias karena dibom oleh pesawat perang Jepang. Dalam kecelakaan itu, 14 imam dan 4 bruder SVD berkebangsaan Jerman yang hendak diasingkan ke Dehra Dun, India, menemui ajalnya. Mereka tenggelam bersama 394 tawanan lainnya. Yang lolos dari maut hanyalah Br. Aloysius Seitz SVD, yang kemudian kembali ke Flores dan bekerja beberapa waktu lamanya sebelum akhirnya kembali ke Eropa.⁴

Dalam situasi serba sulit itu, di luar dugaan, datanglah 4 gembala dari Jepang yang membantu karya misi di Flores (30 Agustus 1943). Mereka adalah Mgr. Paulus Ayiro Yamaguchi (uskup Nagasaki), Mgr. Aloysius Ogihara SJ (uskup Hiroshima), Romo Philipus Kyono dan Romo Mikhael Iwanaga. Kedatangan keempat orang ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh Jepang di

² Disebut dengan nama demikian karena flu ini bermula di Spanyol. Selama perang dunia pertama, Spanyol tidak terlibat (netral) dan karena itu tidak terlalu diberlakukan pengontrolan arus migrasi secara ketat. Flu ini menyebar begitu cepat ke berbagai belahan dunia kemungkinan besar dibawa-serta ke atas kapal oleh pasukan-pasukan perang yang kembali dari Eropa sesudah perang. Penularan penyakit ini semakin meluas karena pasca-perang banyak orang bermigrasi ke mana-mana, kekurangan bahan makanan sangat terasa, banyak orang memiliki kondisi fisik yang lemah dan mudah terserang penyakit. Diperkirakan 1/3 dari penduduk dunia waktu itu (500 juta orang) terinfeksi penyakit ini, 100 juta dari antaranya meninggal dunia. Selengkapnya baca tulisan Robert Stacy, “Influenza Pandemic,” dalam Marsha E. Ackermann, (*et. al.*), *Encyclopedia of World History. Crisis and Achievement 1900-1950*, V, New York: Facts On File, Inc., 2008, hlm. 169-171.

³ Alex Beding, *Solidaritas Benteng Iman*, Maumere: Ledalero, 2012, hlm. 9-10, 18, 21-22.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

kalangan umat Katolik Flores. Sebelum datang ke Flores, Mgr. Yamaguchi sendiri tidak pernah tahu bahwa ada seorang uskup di Flores. Ternyata setelah tiba di Flores, kehadiran 4 orang ini justru tidak memenuhi harapan para pembesar Jepang. Mereka sebaliknya bekerja keras bersama-sama dengan uskup Ende dan para imam untuk membantu Gereja yang menderita itu.⁵ Dalam urusan dengan penjajah Jepang, Mgr. Yamaguchi berperan sebagai penengah yang efektif. Singkat kata, kehadiran Mgr. Yamaguchi dkk. dilihat sebagai satu campur tangan ilahi secara nyata di tengah situasi runyam itu. Mgr. Henricus Leven SVD menyebut mereka sebagai “malaikat-malaikat” utusan Allah sendiri.⁶

2.2. Hindia Belanda: Realitas Keterjajahan

Konteks lokal yang juga penting adalah penjajahan Belanda atas Indonesia. Ketika SVD menerima wilayah misi Sunda Kecil dari tangan Yesuit, Indonesia yang waktu itu disebut Hindia Belanda adalah satu negeri terjajah, salah satu koloni Belanda. Pada waktu itu pemerintah penjajah sedang menerapkan apa yang disebut dengan nama politik etis. Isi dari politik etis ada tiga yakni edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan) dan transmigrasi. Kendatipun demikian, wilayah Kepulauan Sunda Kecil yang jauh dari ibukota tidak mendapat perhatian sama sekali karena dianggap tidak terlalu penting di mata Belanda. Semua program itu lebih banyak dilaksanakan di pulau Jawa. Itu juga bukan demi memajukan masyarakat setempat tetapi karena pemerintah punya perhitungan tertentu. Pendidikan digalakkan dengan maksud untuk menyiapkan tenaga-tenaga untuk kelancaran urusan administrasi pemerintahan, irigasi diusahakan untuk mengairi perkebunan penjajah, dan transmigrasi lebih banyak diadakan untuk mendatangkan tenaga-tenaga kerja untuk keberhasilan perkebunan penjajah.⁷

Menyaksikan politik etis yang diterapkan setengah hati, para putera dan puteri bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengusung ke depan gerakan nasionalisme yang waktu itu marak di Asia dan Afrika. Berbagai ketidakpuasan penduduk atas penjajah Belanda yang cenderung diskriminatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan gerakan ini semakin kuat. Kali ini gerakan ini tidak bersifat sporadis untuk melawan penjajah tetapi lebih untuk menghidupkan nasionalisme sebagai satu bangsa. Perjuangan ini digalakkan oleh kaum intelektual Indonesia yang memiliki pendidikan tinggi namun tidak punya tempat dalam urusan politik negerinya.⁸

Posisi para misionaris dalam perjuangan ini jelas yakni memihak yang kecil dan lemah. Mereka berpihak pada masyarakat terjajah yang berjuang untuk memerdekakan diri.⁹ Persahabatan Soekarno dengan P. Gerardus Huijtink SVD (waktu itu: Pastor Paroki Ende) dan P. Johannes Bouma SVD (waktu itu: pemimpin para misionaris SVD di Sunda Kecil) ketika dalam masa pembuangannya di Ende, 1934-1938, menunjukkan secara jelas keberpihakan ini. Diceritakan bahwa Soekarno sama sekali tidak curiga dengan pastor-pastor itu yang *nota bene* adalah orang-orang Belanda ketika dia berbicara tentang perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia. Pater Huijtink malah sudah lebih dahulu menyebut Soekarno sebagai “presiden Indonesia” sebelum dia betul menduduki jabatan politis itu. Dari hasil persahabatan ini, dari diskusi-diskusi mereka, akhirnya Soekarno memantapkan

⁵ M. P. M. Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia: Pengintegrasian di Alam Indonesia*, IV, Jakarta: Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1973, hlm. 290.

⁶ Alex Beding, *Op. Cit.*, hlm. 30-32.

⁷ Th. van den End dan Jan S. Aritonang, “1800-2005: A National Overview,” dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink, (eds.), *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden and Boston: Brill, 2008, hlm. 163-164; bdk. Steven Drakeley, *The History of Indonesia*, London: Greenwood Press, 2005, hlm. 45-46, 54.

⁸ *The New Encyclopædia Britannica. Macropaedia Knowledge in Depth*, IX, Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 1974, hlm. 484.

⁹ M. P. M. Muskens, *Op. Cit.*, hlm. 270-273, 287.

ide-idenya tentang dasar negara Indonesia, Pancasila, seperti dinyatakan dalam buku: *Bung Karno dan Pancasila: Ilham dari Flores Untuk Nusantara* (Nusa Indah, 2006).¹⁰

2.3. Orde Lama dan Orde Baru

Berkaitan dengan konteks lokal ini perlu diperhatikan juga konteks yang lahir karena kemerdekaan Indonesia. Dua rezim pasca kemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru) masing-masing punya pengaruh tersendiri bagi kehidupan Gereja pada umumnya dan misi SVD pada khususnya. Pada masa Orde Lama, momen penting yang cukup mempengaruhi karya misi yaitu politik indonesianisasi atau naturalisasi tenaga pastoral. Pada masa itu, banyak misionaris yang kesulitan mendapat izin tinggal. Tawaran pemerintah kepada para misionaris untuk beralih kewarganegaraan sebenarnya hanyalah isu pemanis bibir belaka. Nyatanya, banyak permohonan pindah kewarganegaraan para misionaris tidak pernah diurus sungguh-sungguh.¹¹ Sebagai misal, dari semua misionaris Polandia di Flores yang mengajukan permohonan, hanya satu saja yang diberi kewarganegaraan Indonesia yakni P. Wlodzimierz Gorgon SVD (sekarang Pastor Paroki Wudu, Ngada/Flores). Memang kebijakan ini kelihatannya agak negatif namun pada saat yang sama memacu para misionaris untuk lebih serius dengan formasi religius para calon imam, biarawan/wati orang Indonesia asli.

Rezim Orde Baru yang lahir dari satu tragedi berdarah, G-30-S/PKI, dalam seluruh masa kekuasaannya terkesan sangat sentralistis. Hampir banyak urusan di negara ini berada di bawah kontrol negara. Perbedaan pendapat seakan diharamkan. Yang ada hanyalah “persatuan dan kesatuan”, “keseragaman” dan “harmoni” yang dipaksakan. Dalam kaitan dengan kehidupan beragama, ada beberapa – kalau tidak mau disebut banyak – keputusan politik Orde Baru yang mengebiri kebebasan beragama, khususnya kaum beragama minoritas. Hal ini juga dirasakan dampaknya oleh agama Kristen pada umumnya. Ada larangan membangun gereja di lingkungan muslim; pertemuan doa di rumah-rumah dilarang karena meresahkan umat muslim, sementara itu umat muslim bisa berdoa dengan memakai pengeras suara yang bisa didengar di mana-mana; sekolah-sekolah Katolik perlu mengajarkan agama Islam kepada siswa-siswi non-Katolik; dan semua bantuan luar negeri hanya bisa disalurkan lewat Departemen Agama. Pada tahun 1978 Menteri Agama (waktu itu: Dr. Mukti Ali) mengeluarkan keputusan no. 70 yang melarang penyiaran agama kepada orang beragama lain dan no. 77 tentang bantuan luar negeri berupa dana dan tenaga mesti disalurkan lewat Departemen Agama. Peraturan no. 70 pada intinya bisa ditafsirkan bahwa tiap siaran radio, selebaran, obat-obatan, dan bantuan sosial lainnya kepada penganut agama lain bisa dicap sebagai kristianisasi. Selain itu, pada tahun 1979, izin tinggal para misionaris asing di Indonesia dipersulit (Menteri Agama waktu itu: Alamsjah Ratu Prawiranegara). BAKIN dalam kerjasama dengan Departemen Agama mengeluarkan kebijakan bahwa para misionaris mancanegara mesti diperlakukan sama dengan semua orang mancanegara lainnya. Yang dimaksudkan yaitu mereka hanya bisa tinggal di Indonesia selama 4 tahun, kemudian masa tinggalnya bisa diperpanjang sekali untuk 6 bulan, sesudah itu mereka mesti pergi. Singkat kata, aturan ini mempersulit bahkan membatasi masa tinggal para misionaris mancanegara di Indonesia.¹²

¹⁰ Tim Nusa Indah, *Bung Karno dan Pancasila: Ilham dari Flores Untuk Nusantara*, Ende: Nusa Indah, 2006, hlm. 78, 87-88. Pada tanggal 11 Agustus 2013, majalah *Hidup* terbit dengan sajian utamanya tentang hal ini. Cf. “Pancasila, Bung Karno dan Ende,” *Hidup*, XXXII (11 Agustus, 2013), hlm. 8-17.

¹¹ H. J. W. M. Boelaars, *Indonesianisasi. Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 126-128, 267-268; bdk. Th. van den End dan Jan S. Aritonang, dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink, (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 212-213.

¹² *Ibid.*, hlm. 176-179.

Persoalan lain yakni persoalan ormas. Inti persoalannya yakni permintaan Soeharto kepada setiap organisasi massa untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Hal ini ditetapkan dalam Undang-undang no. 8/1985, di mana organisasi gerejani dikategorikan sebagai organisasi sosial. Hal ini dipaksakan juga kepada MAWI sebagai salah satu lembaga gerejani di Indonesia. Berkat peranan presidium MAWI, Soeharto berhasil diyakinkan dengan alasan bahwa MAWI adalah satu organisasi keagamaan dan bukan organisasi massa. Namun demi menjaga keharmonisan dengan pemerintah, MAWI akhirnya diganti dengan nama lain yaitu KWI karena dilihat lebih sesuai dengan istilah dalam Kitab Hukum Kanonik yang baru. Dalam anggaran dasar KWI yang baru, pasal 3, disebutkan Pancasila sebagai asas dari KWI. Demikianlah sejak tahun 1986, MAWI berubah nama menjadi KWI.¹³

Pada tahun 1988, Prof. Dr. Fuad Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyiapkan satu Undang-undang Pendidikan Nasional yang cukup merepotkan sekolah-sekolah swasta. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa anak didik mesti diberi pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Mengingat ada banyak anak muslim yang bersekolah di sekolah Katolik, maka sesuai dengan bunyi pasal itu, lembaga pendidikan Katolik mesti menyiapkan pelajaran agama Islam di sekolah untuk mereka, mendatangkan guru Islam dan menyiapkan fasilitas penunjang seperti ruangan khusus untuk dijadikan sebagai mushola. Aturan ini sampai sekarang belum diberlakukan secara definitif karena ada banyak protes dari kalangan sekolah swasta. Kebijakan yang diambil sekolah Katolik yakni orang tua setiap siswa non-Katolik yang ingin bersekolah di sekolah Katolik mesti menandatangani satu surat pernyataan kesediaan bahwa anaknya akan diberi pelajaran agama Katolik dan bukan agama lain.¹⁴

2.4. Paus-paus 100 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu seratus tahun ini ada 10 orang paus dalam Gereja Katolik. Mereka adalah: Pius X (1903-1914), Benediktus XV (1914-1922), Pius XI (1922-1939), Pius XII (1939-1958), Yohanes XXIII (1958-1963), Paulus VI (1963-1978), Yohanes Paulus I (26 Agustus - 28 September 1978), Yohanes Paulus II (1978-2005), Benediktus XVI (2005-2013), dan Fransiskus (2013-...). Berikut ini akan dibahas hanya beberapa paus yang pemikirannya turut mempengaruhi karya misi Gereja pada umumnya dan karya SVD pada khususnya.

SVD mulai berkarya di wilayah misi Sunda Kecil pada masa pontifikat Paus Pius X (1903-1914). Paus ini dikenal sebagai paus yang menetapkan Katekismus tahun 1912 yang disusun secara sederhana dengan pertanyaan dan jawaban dan berlaku sampai dengan Konsili Vatikan II. Katekismus ini wajib dipelajari pada masa persiapan komuni pertama.¹⁵ Dia juga menetapkan penerimaan komuni setiap hari, dan mengizinkan komuni bagi anak-anak, minimal yang sudah mencapai usia 7 tahun.¹⁶

Paus Benediktus XV (1914-1922) boleh disebut sebagai pausnya Perang Dunia I sekaligus pausnya lembaga seminari. Dia selalu menyerukan perdamaian dan berusaha untuk meringankan penderitaan para korban perang, mereka yang dipenjarakan, dan yang terluka. Keberhasilan terutamanya sebagai seorang paus adalah diterbitkannya Kitab Hukum Kanonik tahun 1917. Kitab ini terbit setelah diperjuangkan kehadirannya selama ± 600 tahun lamanya. Perhatiannya terhadap misi Gereja

¹³ *Ibid.*, hlm. 332.

¹⁴ Th. van den End dan Jan S. Aritonang, dalam Jan Sihar Aritonang dan Karel Steenbrink, (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 215-216.

¹⁵ Claudio Rendina, *I Papi. Storia e Segreti*, II, Roma: Newton Compton Editori s.r.l., 2005, hlm. 784.

¹⁶ Josef Gelmi, *Die Päpste in Lebensbildern*, Carlo Milesi (penterj.), *I Papi: Da Pietro a Giovanni Paolo II*, Milano: RCS Rizzoli Libri S.p.A, 1986, hlm. 247.

terbukti lewat ensikliknya yang sangat terkenal yaitu *Maximum illud* (1919) yang menyerukan kepada para misionaris untuk menyelenggarakan pendidikan imam pribumi yang berkualitas. Inilah ensiklik yang mendorong pembukaan seminari-seminari di berbagai tanah misi, termasuk di Sunda Kecil.¹⁷

Pada masa pontifikat Paus Pius XI (1922-1939), ditetapkanlah “Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam”. Dengan maksud untuk merealisasikan kerajaan Kristus, paus juga memberi dukungan kepada organisasi “*Azione Cattolica*”¹⁸ yang para anggotanya diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kerasulan hirarkis gerejani, namun tetap berada di bawah bimbingan hirarki gereja. Lewat ensiklik *Casti connubi* (1930), paus mengajarkan tentang harkat perkawinan kristiani dan menghukum tindakan aborsi dalam segala bentuknya. Ensiklik sosialnya adalah *Quadragesimo Anno* dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 dari *Rerum Novarum*-nya Paus Leo XIII. Dalam ensiklik itu paus menghukum komunisme dan kapitalisme sebagai ajaran sesat dan mendukung distribusi hasil produksi secara adil dengan para buruh. Berkaitan dengan misi, dia mengajarkan bahwa karya misioner bukan hanya urusan para misionaris tetapi urusan setiap umat beriman (bdk. ensiklik *Rerum Ecclesiae*).¹⁹

Keberhasilannya di bidang politik adalah dicapainya kesepakatan mengenai status negara kota Vatikan seluas 44 hektar sebagai wilayah hukum dengan status internasional sebagai satu negara independen pada tanggal 11 Februari 1929, lewat apa yang disebut dengan nama Pakta Lateran. Pakta itu ditandatangani oleh Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Gasparri dan Benito Mussolini, Perdana Menteri Italia pada masa itu. Pakta ini menandai akhir dari negara kepausan yang sudah ada selama ratusan tahun. Lewat pakta ini juga disepakati kebebasan penuh Takhta Suci tanpa campur tangan penguasa sekular mana pun dalam pengangkatan para uskup; pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah di Italia; dan larangan bagi para imam untuk terlibat dalam kegiatan partai politik.²⁰

Pausnya Perang Dunia II adalah Paus Pius XII (1939-1958). Karyanya yang cukup terkenal tampak dalam ensiklik pertamanya *Summi Pontificatus* (1939) di mana dia menyerukan panggilan untuk menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, perdamaian dunia hanya bisa langgeng jika orang menghormati hak hidup setiap individu yang dijamin oleh satu lembaga internasional. Lembaga ini jugalah yang nantinya bisa menjamin perdamaian antar berbagai negara di dunia ini. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pikirannya ini merupakan cikal-bakal lahirnya lembaga internasional setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti yang kita kenal dewasa ini. Salah satu karya utamanya sebagai paus adalah penetapan dogma “Maria Diangkat ke Surga dengan Jiwa dan Raga” (1950). Paus ini tidak pernah menulis satu ensiklik sosial pun, namun kumpulan hasil diskursusnya mengenai masalah sosial melampaui 4000 halaman. Dia juga cukup banyak mengajar mengenai masalah-masalah moral, hidup perkawinan dan pendidikan anak dalam keluarga.²¹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 254, 256.

¹⁸ Michael E. Engh, “Catholic Action,” dalam R. P. McBrien, (ed.), *The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism*, New York: HarperCollins Publisher Inc., 1995, hlm. 241. Aksi Katolik adalah satu lembaga Katolik yang terdiri dari kaum awam yang bertugas untuk mengembalikan masyarakat ke akar kekristenannya. Mereka biasanya melibatkan diri dalam urusan pembuatan aturan-aturan hukum dan rekonstruksi berbagai institusi kemasyarakatan.

¹⁹ Josef Gelmi, *Op. Cit.*, hlm. 258.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 259-260.

²¹ *Ibid.*, hlm. 266, 269. Dialah paus pertama yang menginternasionalisasi Dewan Kardinal, yang pada masa-masa sebelumnya didominasi oleh para kardinal dari Italia, dengan mengangkat para kardinal dari luar Eropa atau dari daerah misi. Berkaitan dengan negara-negara komunis, dia melawan komunisme yang bersemangat ateis, dan melarang keterlibatan umat Katolik di Cina dalam Gereja patriotik bentukan negara serta mengecam konsekrasi uskup-uskup yang diangkat oleh negara tanpa sepengetahuan Vatikan.

Sesudah Paus Pius XII, tampillah seorang paus lain, Yohanes XXIII (1958-1963) yang kemudian melahirkan Konsili Vatikan II. Inilah paus pertama dalam Gereja Katolik yang menunjukkan simpati dan keterbukaan terhadap modernitas dan mengadakan satu konsili yang lebih bersemangat pastoral daripada doktrinal-disipliner. Dua tahun sebelum meninggal dunia, dia menulis ensiklik sosial *Mater et Magistra* (1961) yang pada intinya berbicara tentang pentingnya memperhatikan aspek sosial ekonomi dalam berpastoral. *Pacem in terris* (1963) adalah ensikliknya yang paling terkenal yang menegaskan bahwa perdamaian di dunia ini hanya bisa tercipta jika keadilan, kebenaran, cinta kasih dan kebebasan ditegakkan.²² Pada masa pontifikat Yohanes XXIII, hirarki Gereja Katolik Indonesia didirikan. Pendirian hierarki ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1961. Itu berarti sejak saat itu Gereja Katolik Indonesia tidak lagi disebut sebagai daerah misi.²³

Yohanes Paulus II (1978-2005) adalah seorang paus yang paling banyak melakukan perjalanan keliling dunia. Dia sendiri mengatakan bahwa dia berjalan keliling untukewartakan injil, meneguhkan umat dalam imannya, untuk melawati Gereja dan untuk menemui manusia. Dia adalah seorang paus yang menunjukkan keterbukaan Gereja kepada dunia. Keterbukaan ini ditunjukkannya sendiri ketika dia berkunjung ke sinagoga di Roma sebagai paus pertama yang masuk ke tempat ibadat kaum Yahudi (13 April 1986) dan menyapa mereka dengan nama: “Saudara sulung”. Dia juga pernah berkunjung ke Rumania, negara dengan jumlah umat orthodox lebih banyak daripada Katolik Roma. Dia juga pernah mengundang para pemimpin agama-agama di dunia untuk berdoa bersama bagi perdamaian dunia di Assisi pada tahun 1986. Di situ dia menegaskan bahwa realitas manusiawi para pemeluk agama mesti dijadikan sebagai unsur pemersatu. Terhadap lembaga perkawinan dia menegaskan bahwa perkawinan tidak bisa diceraikan dan atau dibatalkan dan bahwa hubungan seksual di luar perkawinan adalah tindakan amoral. Terhadap mereka yang tidak mau tahu lagi dengan nilai-nilai moral dia menegaskan pendirian Gereja dalam nilai moral dan etis lewat ensiklik *Veritatis splendor* (1993). Lewat *Evangelium vitae* (31 Maret 1995), dia mengutuk aborsi dan eutanasia. Tanggal 31 Mei 1995, lewat ensiklik *Ut unum sint* dia meminta gereja-gereja kristen untuk menemukan kembali jalan menuju persatuan, dengan melihat kembali berbagai perbedaan pandangan, termasuk mengenai peranan seorang paus. Pada Yubileum Agung 1999, paus ini meminta maaf atas berbagai dosa dan kesalahan gereja Roma di masa lalu. Singkat kata, dia adalah “paus dialog” yang membuka diri dan Gereja terhadap dunia.²⁴

2.5. Dari *Ius Commissionis* ke *Ius Mandatum*

Sebagai koreksi terhadap *Ius Patronas* yang diberikan kepada raja Spanyol dan Portugal pada abad ke-15, Paus Gregorius XV mendirikan Propaganda Fide pada tahun 1622. Dengan itu paus menjadi penanggung jawab utama karya misi Gereja. Karya misi dijalankan sebagai satu delegasi dari pimpinan Gereja kepada para misionaris. Jemaat tidak dilibatkan dalam urusan misi. Dengan demikian Gereja terbelah dua menjadi Gereja yang “normal” (Gereja-gereja di Eropa) dan daerah misi (Asia, Afrika dan Amerika) atau tempat di mana Gereja belum berakar mantap. Pada masa itu, daerah-daerah misi dipercayakan kepada lembaga-lembaga misioner berdasarkan apa yang dikenal dengan nama *Ius Commissionis* (bdk. Kitab Hukum Kanonik 1917, Kanon 252 dan 1350). Dampak dari kebijakan misi seperti ini sangat positif, terutama dilihat dari hasil yang dicapai di tanah misi di mana Gereja berhasil ditanamkan di Asia, Afrika dan Amerika.²⁵

²² *Ibid.*, hlm. 274.

²³ H. J. W. M. Boelaars, *Op. Cit.*, hlm. 139.

²⁴ Claudio Rendina, *Op. Cit.*, hlm. 819, 820, 821, 823, 824; Wilhem Djulei Conterius, *Teologi Misi Milenium Baru*, Maumere: Ledalero, 2007, hlm. 58.

²⁵ Wilhem Djulei Conterius, “Misiologi,” *Manuskrip*, STFK Ledalero 2008, hlm. 154-155.

Sesudah konsili Vatikan II, pada tanggal 24 Februari 1969 keluarlah instruksi “*Relationes*” yang berbicara tentang hubungan kerjasama antara uskup dan tarekat-tarekat religius. Dengan itu *Ius Commisionis* ditiadakan dan diganti dengan *Ius Mandatum*. Aturan baru ini pada intinya menyatakan bahwa uskup setempat sungguh mempunyai wewenang atas wilayahnya dan menjadi penanggung jawab utama karya misi di wilayahnya. Kongregasi religius yang ingin bekerja di keuskupan tertentu mesti mendapat yurisdiksi dari uskup di bawah satu kontrak kerja yang jelas. Uskup bisa lebih leluasa mengundang kongregasi mana pun untuk bekerja di keuskupannya. Dengan demikian, daerah tertentu tidak lagi eksklusif menjadi tempat kerja kongregasi tertentu.²⁶ Perubahan ini terjadi pada masa pontifikat Paus Paulus VI (1963-1978).

2.6. Teologi Misi pasca-Vatikan II

Sesudah Konsili Vatikan II, paradigma misi Gereja mengalami perkembangan yaitu dimasukkannya aspek inkulturasi, dialog antar agama dan pembebasan sebagai dimensi-dimensi misi Gereja yang integral. Gereja mesti mengenal sedalam-dalamnya kebudayaan di mana dia berada, membuka diri untuk menerima kebenaran yang ada dalam agama-agama (dan gereja-gereja lain), dan memahami situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat dewasa ini, baik itu sosial ekonomi maupun sosial politik, termasuk pandangan-pandangan dunia yang bersifat kultural dan sistem-sistem nilai yang dikandungnya.

Kitab Suci Kristen yang ditulis dari latar belakang budaya tertentu tidak bisa berdialog dengan kebudayaan-kebudayaan lain tanpa membuka diri untuk berdialog dengan agama-agama lain dan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Dialog antar agama bisa diusung dengan mengutamakan kesamaan eksistensial kita sebagai manusia yang senantiasa merindukan kebebasan dan pembebasan, keadilan dan persahabatan sejati. Usaha pembebasan masyarakat yang tertindas menjadi perhatian misi Gereja bermula dari perhatian Allah sendiri terhadap kaum kecil, orang-orang yang menderita, yang terpinggirkan.²⁷

Inilah yang menjelaskan munculnya gerakan dialog antar agama, dan perjuangan demi keadilan, perdamaian dunia dan keutuhan ciptaan (JPIC) dalam Gereja dewasa ini. Jadi, kalau SVD terlibat dalam berbagai perjuangan melawan praktek-praktek yang tidak adil seperti korupsi dan perusakan lingkungan lewat pertambangan dengan perizinan yang sesat, itu adalah kehendak Gereja sendiri; itu bukan maunya SVD belaka sekedar untuk mencari soal dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, kalau mau disebut sebagai Gereja yang menjadi sakramen keselamatan bagi dunia, dialog antar-agama (dan gereja), perjuangan untuk menegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, mesti menjadi bagian integral dari hidup kita sebagai orang beriman.

3. Sekilas tentang Sejarah Awal SVD di Indonesia

Kehadiran SVD di Indonesia bermula dari keluarnya keputusan Propaganda Fide untuk menyerahkan wilayah misi Kepulauan Sunda Kecil kepada SVD. Keputusan itu diterbitkan di Roma pada tanggal 8 Februari 1912. Kendatipun demikian, penyerahan nyata wilayah misi itu ke tangan SVD baru terjadi setahun sesudah itu. Penyerahan itu berlangsung di Lahurus, Timor, 1 Maret 1913. P. Adrianus Mathijsen SJ bertindak atas nama Yesuit sedangkan P. Petrus Noyen SVD bertindak atas nama SVD. “Peristiwa Lahurus” itu menandai penyerahan misi dari para Yesuit kepada para misionaris SVD. Yang diserahkan pertama adalah dua stasi misi di Timor yaitu Atapupu dan Fialaran (Lahurus). Sejak itu, secara bertahap SVD mengutus para misionarisnya untuk berkarya di

²⁶ H. J. W. M. Boelaars, *Op. Cit.*, hlm. 166-167.

²⁷ Wilhem Djulei Conterius, *Teologi Misi...*, hlm. 63-64.

seluruh wilayah Sunda Kecil, pertama ke Flores (1915)²⁸, kemudian ke Sumba (1929), Mataram dan Bali (1935), Jawa (1954), Maluku (1967) dan Merauke (1969).²⁹

Pada tanggal 16 September 1913, gugusan Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara), ditetapkan oleh Takhta Suci menjadi sebuah Prefektur Apostolik. Sebagai prefek apostoliknya diangkat P. Petrus Noyen SVD pada tanggal 8 Oktober 1913. Kendati demikian, pulau Flores tidak termasuk dalam wilayah prefektur yang baru didirikan itu. Alasannya sederhana saja: para Jesuit terlalu mencintai Flores sampai susah untuk melepaskan tanah misi itu ke tangan misionaris lain. Flores baru diserahkan kepada SVD pada tanggal 20 Juli 1914 berdasarkan keputusan dari Propaganda Fide. Keputusan itu diambil setelah mendapat informasi bahwa Jesuit kekurangan tenaga misionaris untuk melayani umat yang pada waktu itu berjumlah sekitar 28.000 jiwa. Generalat SVD mendirikan Regio SVD Sunda Kecil sedikit lebih kemudian yakni pada tanggal 3 Mei 1920 yang berpusat di Ndonga, Ende, Flores. P. Petrus Noyen SVD diangkat menjadi Regional pertama. Pendirian ini terjadi terlambat karena untuk menjadi satu regio, perlu tenaga misionaris yang cukup. Pada waktu itu, sudah ada tambahan 25 tenaga misionaris dari Togo dan Mosambik. Karena itu, regio Sunda Kecil bisa didirikan.³⁰

Para misionaris Jesuit di Timor meninggalkan misi itu beberapa waktu sesudah penyerahan terjadi. Pater Mathijsen meninggalkan Timor pada hari Sabtu, 24 Mei 1913, sebagai misionaris Jesuit terakhir yang meninggalkan daerah misi itu. Sementara itu, di Flores situasinya sedikit berbeda mengingat banyak umat yang perlu dilayani. Ada satu kesepakatan di antara para pembesar SJ dan SVD yakni bahwa selama misionaris SVD belum cukup, para imam dan bruder Jesuit masih terus membantu di Flores. Misi Jesuit di Flores berakhir secara resmi pada tahun 1917 dengan berangkatnya P. C. Hoeberechts, SJ ke Jawa. Beliau diganti oleh P. W. Baack, SVD – salah satu korban flu Spanyol seperti disebutkan di atas – sebagai superior wilayah misi Larantuka (Flores). Misionaris Jesuit terakhir meninggalkan Flores pada tanggal 10 Maret 1920. Dia adalah P. Anton Ijsseldijk SJ, seorang pastor yang bekerja selama 35 tahun (1885-1920) di paroki Koting, Kabupaten Sikka, Flores.³¹

4. Karya-karya Yang Menandai Kesuksesan SVD

Tidak diragukan lagi bahwa setiap misionaris SVD yang datang ke bumi Indonesia ini mempunyai komitmen yang tinggi untuk membaktikan diri bagi pelayanan umat. Mereka mendaki bukit menuruni lembah, menyeberangi kali dan sungai serta mengarungi laut dan selat bukan hanya untuk bercerita mengenai Tuhan yang baik, tetapi juga mencoba mengungkapkan kebaikan Tuhan itu melalui pelayanan serba ragam. Berikut akan diuraikan beberapa bukti keragaman karya pelayanan para misionaris itu dalam beberapa bidang penting.

4.1. Pastoral Parokial dan Strategi Pastoral

Sesudah penyerahan wilayah misi Sunda Kecil kepada SVD, para misionaris mulai menerima stasi-stasi misi. Di Timor stasi-stasi pertama yang diterima oleh SVD adalah Atapupu dan Lahurus (1913).

²⁸ Petrus Noyen meninggalkan Timor menuju ke Ndonga di Ende tanggal 14 Mei 1915. Cf. M. P. M. Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia. Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Waligereja Indonesia* (Jakarta: Dokpen MAWI, 1974), IIIb, p. 1116.

²⁹ Kurt Piskaty dan Joannes Riberu, *Nusa Tenggara: 50 Jahre Steyler Missionare in Indonesien (1913-1963)*, Piet Petu, (Penyad.), *50 Tahun: Setengah Abad Karya Misi SVD*, Ende: Percetakan Arnoldus, 1966, hlm. 13-14.

³⁰ Anton Möhlmann dan Wolfgang Ndouk, "Kronik Sejarah 75 Tahun SVD Berkarya di Indonesia," dalam Hendrik Djawa, Marcel Beding, John Dami Mukese, (eds.), *Dalam Terang Pelayanan Sabda*, Ende: Komisi Komunikasi Provinsi SVD Ende, 1990, hlm. 46.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48.

Kemudian, SVD membuka lagi stasi-stasi baru. Stasi pertama yang dibuka oleh SVD di Timor adalah Tubaki, Belu Selatan (1914) dengan pastor pertamanya adalah P. Frans de Lange SVD ditemani oleh Br. Sales van de Lith SVD. Dalam tahun yang sama P. Arnoldus Verstraelen ditugaskan sebagai pastor Lahurus. Di Flores SVD mulai dengan menerima stasi Larantuka dari tangan imam Jesuit tahun 1915. Sementara itu, Stasi Ndonga dimulai oleh P. Petrus Noyen sendiri bersama dengan Br. Willibrordus Donkers SVD dan Br. Lambertus Schoren SVD juga pada tahun 1915. Inilah stasi pertama di seluruh Flores yang didirikan oleh SVD. Di Flores Timur, stasi pertama yang didirikan oleh SVD adalah stasi Lamalera (1920) dengan pastor pertamanya adalah P. Bernhard Bode. Stasi Lewoleba didirikan tahun 1926 disusul stasi Hokeng (1928). Sementara itu di wilayah Sikka, SVD tiba di Maumere tahun 1919. Kemudian berturut-turut mulai dibuka stasi misi Ili dan Paga-Mauloö (1920). Sementara itu, wilayah Ngada-Nagekeo dimulai dengan pendirian stasi Mataloko (1920) dengan pastor pertamanya adalah P. Josef Ettl SVD. Stasi kedua dan ketiga yang didirikan adalah stasi MBC Bajawa (1921) dan Raja (1926). Di Ruteng, P. Bernhard Glanemann menjadi pastor pertama yang tiba di sana (23 September 1920) sekaligus memulai stasi misi di Ruteng. Dua stasi lain yang didirikan kemudian di Manggarai adalah Rekas (1926) dan Lengko Ajang (1929).³²

Sesudah penempatan pastor-pastor pertama ini, perlahan-lahan stasi-stasi ini ditingkatkan menjadi paroki-paroki, kemudian diikuti dengan pembentukan dekenat tanggal 1 Oktober 1929. Sementara itu status Prefektur Apostolik Sunda Kecil mulai ditingkatkan menjadi vikariat apostolik 14 Maret 1922. Semua usaha ini akhirnya membuahkan hasil ketika pada tahun 1937 vikariat Sunda Kecil melahirkan satu vikariat baru yaitu Vikariat Apostolik Timor-Olandese dengan uskup pertamanya Mgr. J. Pessers SVD.

Visitasi General yang pertama ke Indonesia dilakukan oleh Superior General, P. Wilhelm Gier SVD (1920-1932), yang berlangsung dari tanggal 20 Pebruari - 12 April 1922. Visitasi ini penting karena dipandang sebagai salah satu dasar keberhasilan karya pastoral di Sunda Kecil. Di tengah visitasi ini juga dilangsungkan satu konferensi misi di Ndonga dari 20-26 Maret 1922. Buah-buah pikiran dari konferensi ini juga turut membimbing para peserta sinode pertama Vikariat Apostolik Sunda Kecil, 15-22 Agustus 1935. Hasil sinode itu selanjutnya dirumuskan dalam buku pegangan karya pastoral bagi para petugas pastoral. Buku itu dikenal dengan nama "*Manuale Pastorale*" yang diterbitkan pertama kali tahun 1939, di dalamnya bisa ditemukan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana menjalankan pelayanan pastoral secara berdaya guna. "*Manuale Pastorale*" ini berlaku selama 20 tahun sebelum direvisi/diganti. Adanya pedoman pastoral ini dan lebih-lebih lagi sikap para misionaris yang secara tertib melaksanakannya, merupakan salah satu kunci keberhasilan karya misi pada waktu itu.³³

Strategi pastoral yang biasa dipakai yaitu mengenal budaya setempat; belajar bahasa setempat; berpatroli secara teratur dengan jadwal yang pasti; tinggal bersama umat dan mengajarkan iman kepada umat; mengunjungi sekolah dan mengajar agama kepada para murid; urusan pembangunan ditangani para bruder, sedangkan pastor merepotkan diri dengan *cura animarum*; mengadakan persiapan menjelang penerimaan sakramen-sakramen, membentuk organisasi-organisasi rohani seperti organisasi: Santa Maria, Legio Maria, Serikat Santo Yosef, Serikat Santo Aloysius, Serikat Santa Theresia, Serikat Santa Agnes, Serikat Santa Anna, Aksi Katolik, Kongregasi Keluarga Kudus, Persaudaraan Sosial Katolik Ruteng (Ruteng). Yang terlibat dalam organisasi-organisasi ini adalah kaum intelektual, pegawai, para tentara dan polisi, usahawan dan buruh, kaum muda, juga mahasiswa. Semua organisasi ini dimaksudkan untuk membina iman umat, menyiapkan mereka

³² Buku Kenangan 25 Tahun Propinsi SVD Ruteng, *Manuskrip*, 13 Mei 1988, hlm. 6, 8.

³³ L. Lame Uran, *Sejarah Perkembangan Misi Flores Dioses Agung Ende*, tt., hlm. 195-197, 335-336. Catatan: buku ini tidak menyebutkan tempat terbit, penerbit dan tahun penerbitan.

menjadi saksi Kristus, juga menjadi penolong-penolong karya pastoral para imam.³⁴ Bentuk-bentuk spiritualitas baru yang diperkenalkan adalah menyambut komuni lebih sering (seperti dianjurkan oleh Paus Pius X), merayakan ekaristi Jumat pertama setiap bulan, prosesi Jumat Agung, prosesi Sakramen Mahakudus pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, pemberian ret-ret kepada para guru agama/sekolah dan kepala kampung, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur, wajib misa setiap hari Minggu, paguyuban kematian, pengadaan pekuburan Katolik dan sebagainya.³⁵

Yang pasti, dalam menjalankan karya pastoral, para imam tidak bekerja sendirian. Patut disebut secara khusus peran penting para guru agama dan guru sekolah dalam pengajaran iman. Mereka ini yang tahu baik bahasa dan budaya setempat, dibandingkan para misionaris asing itu, tampil menjadi pewarta Sabda yang bisa diandalkan. Kendatipun demikian, mereka tidak mengajar dari kemampuan mereka sendiri; para misionaris memberdayakan mereka terlebih dahulu lewat rekoleksi bulanan dan retreat tahunan yang dibuat secara teratur. Di Flores Timur mereka ini biasa disebut para penolong. Sebagai contoh, guru agama (penolong) yang sangat terkenal di Lembata adalah: Bapak Petrus Tetu (Puor), Bapak Paulus Sili Bataona (Ile Ape). Sedangkan guru sekolah yang juga berperan ganda sebagai guru agama yaitu: Bapak Stanislaus Lela Tufan (Ile Ape) dan Bapak Andreas Sinu Beding (Kedang). Mereka-mereka ini punya pengaruh luar biasa di mata masyarakat dan umat. Pada masa-masa awal karya SVD, guru-guru semacam ini sangat banyak dijumpai di Flores. Khusus untuk guru-guru sekolah, mereka betul menjadi tangan kanan pastor untuk pengajaran iman di sekolah-sekolah. Dalam realitas, biasanya tidak ada satu anak pun yang meninggalkan sekolah tanpa dibaptis terlebih dahulu. Pada malam hari, para guru ini berjalan keliling dari kampung ke kampung dengan lentera untuk mengajar iman. Ketika Perang Dunia II pecah di mana banyak paroki ketiadaan gembala, iman kekatolikan umat di banyak tempat tetap dipertahankan berkat bantuan para guru agama dan guru-guru sekolah ini.³⁶

Satu tantangan yang cukup serius dalam karya pastoral adalah perbenturan antara adat perkawinan setempat dengan aturan perkawinan Katolik. Benar bahwa poligami cukup jarang ditemukan di Flores, tetapi sangat sering dipraktikkan oleh kaum kaya dan berpengaruh (segelintir orang). Menanggapi hal ini, para misionaris SVD tidak terlalu repot mengurus orang yang berpoligami. Generasi tua bukanlah menjadi sasaran utama karya para imam, sejauh mereka tidak menganut Islam atau menghalangi karya misi. Fokus perhatian diarahkan kepada anak-anak kecil dan orang muda dengan harapan bahwa mereka akan memulai satu generasi Kristen yang lebih baik daripada orang tua mereka.³⁷

Beberapa persoalan lain yang menghambat pernikahan Katolik yang sah adalah “kawin tungku”. Yang dimaksudkan adalah perkawinan di antara saudara-saudari sepupu. Di Flores hal ini cukup umum terjadi. Selain itu, praktik belis atau mahar yang sering kali diserahkan dalam beberapa tahap, campur tangan orang tua dalam pemilihan jodoh, dan ritus adat yang mesti dibuat ketika dilangsungkan acara perkawinan, semuanya merupakan kendala-kendala utama dalam pastoral perkawinan. Sikap para misionaris SVD sesuai *Manuale Pastorale*, seperti dikutip oleh Karel Steenbrink, adalah melihat perkawinan yang murni kafir sebagai perkawinan yang absah; tidak boleh ada pernikahan baru setelah salah satu atau kedua pasangan dibaptis; dan ritus perkawinan adat dan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 314; Lihat juga “Buku Kenangan 25 Tahun Propinsi SVD Ruteng,” *Op. Cit.*, hlm. 9. Bdk. Alex Beding, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³⁵ Karel Steenbrink, *Orang-orang Katolik di Indonesia 1808-1942. Pertumbuhan Yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri 1903-1942*, II, Maumere: Ledalero, 2006, hlm. 234, 241.

³⁶ Hendrik Djawa, “Karya SVD di Bidang Pendidikan,” dalam Hendrik Djawa, Marcel Beding, John Dami Mukese, (eds.), *Dalam Terang Pelayanan Sabda*, Ende: Komisi Komunikasi Provinsi SVD Ende, 1990, hlm. 91; Wawancara dengan P. Alex Beding SVD (usia: 88 Tahun), Biara Santo Arnoldus Larantuka, 5 Agustus 2013, pukul 20.00-20.30.

³⁷ Karel Steenbrink, *Op. Cit.*, hlm. 251.

campur tangan orang tua dalam urusan perkawinan dianggap baik guna menjamin stabilitas perkawinan.³⁸

Berhadapan dengan agama asli, para misionaris SVD lebih bersikap moderat dibandingkan dengan para misionaris Jesuit. Jesuit melihat agama asli sebagai praktek berhala dan karena itu mesti dimusnahkan, sedangkan para misionaris SVD berprinsip bahwa agama asli juga mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya. Tugas seorang misionaris bukanlah untuk memberantas agama asli tetapi memurnikan praktek dan nilai-nilai di dalamnya. Pemurnian itu bisa dilakukan secara bertahap lewat jalur pendidikan formal dan pembinaan iman berlanjut.³⁹

Sejak SVD berkarya di Provinsi SVD Ende 100 tahun yang lalu, seluruh paroki di Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Larantuka dan Keuskupan Maumere dilayani oleh SVD. Namun, sejak berkembangnya Gereja lokal dalam pelbagai aspeknya, teristimewa di bidang tenaga pastoral, uskup setempat menjadi pemimpin tertinggi dan dengannya karya pastoral parokial pun diambil-alih oleh imam-imam diosesan. Perkembangan ini bisa dilihat sebagai salah satu dampak positif dari *Ius Mandatum*, yang juga sangat sesuai dengan misi dan kharisma khas SVD. Sampai sekarang (2013), terhitung masih 50 misionaris SVD yang bekerja di 29 paroki, dengan perincian sebagai berikut: Keuskupan Agung Ende 9 paroki, Keuskupan Maumere 5 paroki, Keuskupan Larantuka 6 paroki, Keuskupan Amboina 2 paroki, Keuskupan Sorong-Manokwari 4 paroki dan Keuskupan Jayapura 3 paroki.⁴⁰

4.2. Pendidikan Calon Imam/Bruder

Sesudah ensiklik *Maximum illud* Paus Benediktus XV diterbitkan tahun 1919, SVD tercatat sebagai kongregasi pertama di Indonesia yang cepat tanggap atas seruan paus dengan memulai pembinaan calon imam pribumi. Seminari Mataloko di Flores yang didirikan tahun 1929 (sebenarnya sudah dimulai di Sikka tahun 1926) terhitung sebagai seminari kedua setelah seminari Muntilan milik Jesuit di Jawa Tengah yang didirikan tahun 1913, jauh sebelum *Maximum illud* disebar. Ketika SVD memulai seminari di Sikka (2 Februari 1926), pada tahun yang sama Muntilan menuai hasil didikannya yang pertama dengan ditahbiskannya tiga imam Jesuit pertama yakni Romo F. X. Satiman, Romo A. Djajasepoetra dan Romo A. Prawirapratama.⁴¹ SVD menuai buah pertama dari

³⁸ *Ibid.*, hlm. 255-256.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 243, 244.

⁴⁰ "Laporan Provinsial SVD Ende (P. Leo Kleden SVD)," dalam *Dokumen Kapitel Provinsi SVD Ende XXI*, Ledalero, 20-25 Februari 2012, hlm. 6, 8. Di samping 50 orang yang bekerja di paroki, 180 anggota berkaul kekal lainnya bekerja di bidang-bidang lain seperti: Pembina/formator (30), sekolah dan pendidikan (30), administrasi/komisi/lembaga SVD (43), kerasulan kategorial (14), sedang studi lanjut (15), yang pensiun dan sakit (33), lain-lain (11). Catatan: dalam laporan ini provinsial menyebutkan bahwa jumlah anggota provinsi SVD Ende yang berkaul kekal (imam dan bruder), sebanyak 230. Kemudian, konfrater yang studi lanjut sebanyak 15 orang. Namun karena beberapa bulan lalu, 3 orang yang sedang studi lanjut sudah kembali ke provinsi, maka data terbaru adalah 12 orang. Tahun lalu dan tahun ini ada 5 konfrater yang meninggal dunia: Jeronimo do Rego, Yosef Kuda Makin, Alex Ganggu, Josef Boumans dan Grace da Silva. Tahun lalu juga seorang anggota formator berangkat ke Roma untuk tugas sebagai anggota dewan jenderal (Paul Budi Kleden), sedangkan koordinator Kitab Suci SVD sejagat, Lukas Jua, kembali ke provinsi. Maka jumlah terakhir anggota provinsi SVD Ende adalah 225 orang.

⁴¹ H. J. W. M. Boelaars, *Op. Cit.*, hlm. 113-114, 245. Sampai sekarang SVD Indonesia memiliki dua seminari tinggi yaitu: Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero yang didirikan tahun 1937, terdapat di Flores, dan Seminari Tinggi Surya Wacana Malang, diresmikan tanggal 19 Desember 1983. Sejarah mencatat bahwa Seminari Tinggi Ledalero adalah seminari tinggi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan seluruh pendidikan filsafat dan teologinya di dalam negeri, tidak seperti seminari-seminari lain yang pada masa awal, para calonnya menjalani studi filsafat dan teologi mereka di luar negeri.

Seminari-seminari kecil di Nusa Tenggara adalah: Mataloko/Ngada, Flores (1929), Hokeng/Flores Timur (1950), Lalian/Belu, Timor (1950), Tuka/Bali (1953), Kisol/Manggarai, Flores (1955), Sinar Buana/Weetebula, Sumba (1967) Oepoi/Kupang, Timor (1984), Labuan Bajo/Manggarai, Flores (1987), Bunda Segala Bangsa/Maumere, Flores (2002).

lembaga pendidikan calon imamnya tanggal 28 Januari 1941 lewat peristiwa bersejarah, tabhisan imam Fr. Karolus Kale Bale SVD dan Fr. Gabriel Manek SVD⁴² (kemudian menjadi uskup Agung Ende), di Gereja Nita, Maumere. Inilah dua imam sulung pribumi dari Nusa Tenggara. Ikon pendidikan seminari di Nusa Tenggara adalah P. Frans Cornelissen SVD.⁴³

Sejak tabhisan perdana di atas (1941) sampai dengan tahun 2013, Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero telah menahbiskan 840 orang imam SVD (jumlah ini sudah ditambah dengan 19 diakon SVD dari Ledalero yang akan ditahbiskan tahun ini). Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya, dua orang misionaris SVD dari Ledalero dibenun untuk berkarya di luar negeri yaitu Papua New Guinea. Mereka adalah P. Severinus Pambut SVD dan P. John Don Bosco Tou SVD (keduanya sudah meninggal dunia). Dalam suratnya kepada Provinsial SVD Ende, 29 Juli 1982 tentang penempatan itu, Superior General Henry Heekeren menyebut peristiwa ini sebagai satu momentum penting yang menandai dimulainya partisipasi gereja lokal Indonesia dalam karya misioner Gereja universal. Sejak saat itu, setiap tahun belasan misionaris diutus ke luar negeri.⁴⁴ Hingga kini sudah lebih dari 470 misionaris SVD Indonesia (gabungan imam dan bruder dari Ledalero, Surya Wacana Malang dan BBK Ende) berkarya di 46 negara.⁴⁵

Perlu diketahui bahwa pada awal mula, ketika angkatan pertama menyelesaikan studi mereka di Seminari Menengah Yohanes Berhcmans Mataloko, ada dua pendapat berbeda di kalangan SVD. Ada yang mau menerima mereka menjadi anggota SVD tetapi ada yang menganjurkan agar mereka menjadi calon imam sekulir saja. Mereka yang menganjurkan ke sekulir dilatarbelakangi dengan satu pertimbangan yang kurang bagus. Yang tidak bagus itu adalah mereka diminta menjadi calon imam sekulir karena dianggap sebagai orang-orang dari suku bangsa “kelas dua, atau mungkin kelas tiga” dibandingkan dengan orang-orang Eropa yang berstatus “kelas satu.” Pada waktu itu, dalam SVD ada tingkatan sosial-religius yang dikenal dengan nama “*ordo praecedentiae*”, dengan hirarki jelas siapa di atas siapa di bawah, mulai dari Superior Jeneral sampai yang paling bawah yaitu seorang bruder novis. Rasanya tidak enak bila seorang pribumi diterima masuk novisiat SVD karena dengan itu, status mereka lebih tinggi dari para bruder yang nota bene adalah etnis Eropa. Waktu itu etnis Eropa merasa diri lebih superior dari etnis pribumi atau etnis lainnya.⁴⁶

Kendatipun demikian, ada kelompok yang lebih moderat dan mau menerima para calon itu untuk bergabung dengan SVD. Namun penerimaan ini tidak pernah terjadi karena paksaan tetapi atas dasar pilihan bebas mereka sendiri. Mereka tidak pernah diminta untuk bergabung dengan SVD. P. Adrianus Conterius SVD misalnya, ketika bercerita tentang kisah awalnya bergabung dengan

Catatan: pada tahun 1967 didirikan Seminari Menengah Pertama Yohanes XXIII di Lela tetapi kemudian ditutup 20-an tahun sesudah itu. Cf. Paul Budi Kleden, “Pendidikan Calon Imam Yang Kontekstual,” dalam Antonio Camnahas dan Otto Gusti Madung, (eds.), *...ut Verbum Dei currat. 100 Tahun SVD Indonesia*, Maumere: Ledalero, 2013, hlm. 180-181.

⁴² Selain menjadi uskup agung, Mgr. Gabriel Manek SVD juga adalah pendiri kongregasi PRR (Puteri Renha Rosari). Kongregasi ini didirikan pada tanggal 15 Agustus 1958. Anggota kongregasi ini sekarang tersebar di seluruh Indonesia bahkan sudah sampai ke mancanegara.

⁴³ Eduard Jebarus, *Sejarah Persekolahan di Flores*, Maumere: Ledalero, 2008, hlm. 107; bdk. H. J. W. M. Boelaars, *Loc. Cit.* Informasi lengkap tentang pendidikan imam di Nusa Tenggara bisa dibaca dalam tulisan Frans Cornelissen SVD, *50 Tahun Pendidikan Imam di Flores, Timor dan Bali*, Ende: Percetakan Offset Arnoldus, 1978.

⁴⁴ Cf. Surat Superior General SVD (P. Henry Heekeren SVD) kepada Provinsial SVD Ende (P. Clemens da Cunha SVD), Roma, 29 Juli 1982, U 01 e / 2. 116.

⁴⁵ Data ini diambil dari penjelasan P. Leo Kleden SVD, Provinsial SVD Ende dalam film “Sahabat Sang Sabda (durasi 51:17 menit),” Ledalero: Seksi Kerasulan dan Animasi 100 Tahun SVD Indonesia, Copyrights 2013, menit ke-34:03-34:20. Data tentang tabhisan imam Ledalero selama 100 tahun diambil dari arsip Dokumentasi Provinsi SVD Ende, tanggal 19 Juni 2013.

⁴⁶ Hendrik Djawa, “Karya SVD dalam Pendidikan Calon-calun Imam,” dalam Hendrik Djawa, Marcel Beding, John Dami Mukese, (eds.), *Op. Cit.*, hlm, 113.

SVD, jelas di sana bahwa dialah yang meminta bahkan terkesan sedikit “memaksa” untuk menggabungkan diri dengan SVD.⁴⁷

SVD tidak hanya memperhatikan pendidikan calon imam religius untuk serikatnya. Sejarah membuktikan bahwa imam projo pertama untuk Nusa Tenggara adalah Romo Lukas Lusi Pr, yang ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1944. Kendatipun demikian, lembaga pendidikan untuk para calon imam diosesan di Nusa Tenggara yang dirintis oleh SVD baru dimulai secara resmi pada tahun 1955. Sebelum memiliki tempat formasi sendiri di Ritapiret, para calon imam diosesan awal diasuh bersama para calon imam SVD di Ledalero (1955) di bawah bimbingan prefeknya sendiri. Tokoh yang berperan penting untuk pendidikan imam diosesan ini adalah P. Josef Boumans SVD.⁴⁸ Dialah yang membuka rumah pendidikan calon imam diosesan di Ritapiret dan menempatnya bersama para frater pada tahun 1959, sekaligus menjadi Praeses pertamanya.⁴⁹

Pada tahun 1998 jumlah imam projo di seluruh Indonesia sebanyak 971 orang. Jika dibuat perbandingan dengan wilayah lain di Indonesia, sampai dengan tahun 1998, keuskupan-keuskupan di Nusa Tenggara menempati urutan pertama dengan jumlah imam projo sebanyak 370, disusul keuskupan-keuskupan di Jawa (gabungan Provinsi Gerejani Jakarta dan Provinsi Gerejani Semarang) di urutan kedua dengan jumlah 284, dan urutan ketiga Provinsi Gerejani Makassar dengan jumlah 116 orang. Provinsi gerejani yang jumlah imam projanya paling sedikit adalah Irian Jaya (24 orang). Jika dihitung per keuskupan, maka keuskupan yang memiliki jumlah imam projo terbanyak adalah Keuskupan Agung Semarang (120 orang) disusul Keuskupan Agung Ende (119; waktu itu Maumere masih bagian dari Ende), dan keuskupan Larantuka (77 orang). Keuskupan yang jumlah imam projanya paling sedikit adalah keuskupan Banjarmasin dan keuskupan Agats dengan jumlah tiap-tiapnya 1 orang, disusul di urutan kedua dari bawah yaitu keuskupan Sibolga dan keuskupan agung Pontianak, masing-masing 7 orang imam projo.⁵⁰

Berkaitan dengan formasi para calon bruder SVD, pemikiran untuk mendidik pemuda-pemuda Flores menjadi bruder sudah ada mendahului (1920) rencana pembukaan seminari. Hal ini berawal dari niat beberapa orang pribumi (kelompok para tukang bangunan) yang ingin menjadi bruder: di Ende, Ndonga, Bajawa, dan Manggarai. Calon-calon awal ini kemudian berhenti. Awal yang lebih jelas dimulai di Ledalero ketika pada tanggal 12 Agustus 1942, P. Jac. Koemeester, Rektor dan Magister Novisiat di Ledalero menerima dua orang kandidat pertama dari Larantuka, Fransiskus Pai da Silva (tukang besi, berasal dari Pantai Besar, Larantuka) dan Salomon Koke (tukang kayu; berasal dari Wailebe, Adonara) untuk dididik menjadi bruder. Tanggal 29 Juni 1943, empat kandidat pertama diterimakan jubah dan memulai masa novisiat mereka di Ledalero di tengah situasi Perang Dunia II. Pada tanggal 29 Juni 1945 terjadi pengikraran kaul pertama (di Mataloko) tiga orang bruder SVD pribumi Flores. Buah dari pendidikan awal ini dipetik pada tanggal 29 Juni 1951, ketika dua orang kandidat dari angkatan pertama novisiat tahun 1943 mengikrarkan kaul kekal di kapela agung Seminari Tinggi Ledalero. Mereka adalah Br. Paskalis (nama asli: Salomon Koke) dan Br. Marcellus (nama asli: Petrus Pitang). Pada tanggal 3 Juni 1955, novisiat calon bruder ini dipindahkan dari Ledalero ke Ende, tepatnya di Biara Bruder St. Konradus (BBK), Jalan Wirajaya. Novisiat bruder ini

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

⁴⁸ P. Josef Boumans, SVD meninggal dunia tanggal 7 Mei 2013 dan jenazahnya dimakamkan di pekuburan Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret (8 Mei 2013); satu ungkapan penghormatan terhadap jasa-jasanya sebagai pendiri seminari tinggi diosesan itu.

⁴⁹ “Kronik Lima Puluh Tahun Seminari Tinggi Ledalero: 1937-1987,” dalam Laurens da Costa dan Anton Möhlmann, *50 Tahun Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero*, Ende: Percetakan Arnoldus, tt., hlm. 22, 23; bdk. Lame Uran, *Op. Cit.*, (lihat: Lampiran 1), hlm. 332.

⁵⁰ Cf. *Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2001, hlm. xvii. Data-data di atas diolah dari tabel 1 tentang statistik Gereja Katolik Indonesia per 31 Desember 1998 yang ada di halaman itu.

diresmikan secara kanonik pada tanggal 14 Juni 1955 berdasarkan surat keputusan dari Kongregasi Propaganda Fide dan Kongregasi Urusan Kaum Religius.⁵¹ Sampai dengan tahun 1989, Nusa Tenggara memiliki jumlah bruder (gabungan dari berbagai kongregasi, terbanyak SVD) sebanyak 137 orang, menempati urutan kedua sesudah Jawa. Itu berarti 20% bruder di Indonesia berada di Nusa Tenggara.⁵²

4.3. Pendidikan Formal dan non-Formal

Sebelum SVD datang, sudah ada sekolah di Flores yang dirintis oleh seorang imam projo Belanda, Pater Caspar Johannes Fransiscus Franssen yang kemudian dilanjutkan oleh para imam Jesuit. Pada tanggal 3 Desember 1862 (pesta St. Fransiskus Xaverius), Pater Franssen mendirikan sekolah pertama di Flores, tepatnya di Posto, Larantuka, menggunakan sebagian dari ruang Gereja, seluas 10 x 10m, dekat pintu masuk. Angkatan pertama berjumlah 25 orang, terdiri dari 24 laki-laki dan 1 perempuan, puteri raja Larantuka. Anak-anak yang lain berasal dari keluarga pejabat, kalangan elit, rakyat jelata dan orang Tionghoa. Sekolah ini kemudian disebut Sekolah Putera Larantuka. Sekolah puteri pertama dimulai oleh suster-suster Fransiskanes dari Hethuysen Belanda, di Balela, Larantuka, pada tanggal 21 April 1879 dengan jumlah murid 20 orang. Sementara itu, sekolah putera di Maumere dibuka oleh Pater Cornelius Henricus Antonius Ten Brink pada 1874, diikuti kemudian dengan pembukaan sekolah putri pada tahun 1890 oleh suster-suster Belas Kasih dari Tilburg, Belanda (sekarang: SCMM). Sekolah putera dan puteri ini kemudian dipindahkan ke Lela berturut-turut pada tahun 1897 dan 1899. Umumnya semua murid diasramakan. Sampai tahun 1900 sudah ada 5 Sekolah Desa yaitu Larantuka putra, Larantuka puteri, Lela putra, Lela putri, dan Koting. Tahun 1906, didirikan lagi beberapa sekolah agama di Flores Timur, tepatnya di Waibalun-Lewolere, Lebao Tengah, Lewolaga, Konga, dan Lamalera. Di Maumere juga didirikan sekolah agama di Nele, Halat, Koting, Nita, Paga, Geliting, Ili, Bloro, Wukak, dan Maumere. Sekolah-sekolah agama ini pada tahun 1910 dijadikan sekolah biasa.⁵³

Sejak tahun 1863, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah di Lewoloba[sic.] (atau Lewoleba?) dan Lebao Tanjung Bunga (Flores Timur). Pemerintah mulai membuka sekolah di Maumere pada tahun 1910 bertempat di Nele, Koting, Sikka dan Lela. Tahun 1911 dan 1912, Organisasi Sekolah Katolik Roma Flores mendirikan beberapa sekolah baru di Ende Lio (Ngalupolo, Watuneso, Nggela, dan Nangapanda) dan di Manggarai: Labuan Bajo (1911), Reo (1911), Pota (1911) dan Ruteng (1912). Sekolah-sekolah di Ngada: Boawae (1912) dan Bajawa (1912).⁵⁴ Dengan demikian, ketika SVD tiba di Flores tahun 1915, sudah ada 36 Sekolah Desa dengan perincian 30 sekolah misi dan 6 sekolah pemerintah.

Khusus untuk Sunda Kecil, karya SVD di bidang pendidikan dipermudah oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda berkaitan dengan “Politik Etis.” Pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda menyerahkan pengelolaan sekolah di Flores dan Sumba kepada *Missie* (Katolik) dan *Zending* (Protestan) lewat kebijakan “*Flores-Sumba Contract/Regeling*.” Aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, A. F. van Idenburg itu, pada intinya meminta *missie* di Flores (dan *zending* di Sumba) untuk membuka sekolah di tempat-tempat di mana pemerintah belum menyelenggarakan sekolah. Aturan ini diprotes oleh Menteri Urusan Koloni yang bernama Pleyte (anggota kabinet baru hasil pemilu 1913). Menurutnya *regeling* 1913 itu memberi wewenang terlalu luas kepada *missie* dan *zending* dan karena itu mengebiri peran seorang Gubernur Jenderal yang

⁵¹ Editor, “Karya SVD dalam Bidang Pendidikan Bruder Pribumi,” dalam Hendrik Djawa, Marcel Beding, John Dami Mukese, (eds.), *Op. Cit.*, hlm, 125, 127, 131, 133, 134, 138, 139.

⁵² H. J. W. M. Boelaars, *Op. Cit.*, hlm. 257-258.

⁵³ Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 28, 31-32, 35-36.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38, 47.

seharusnya berkewajiban mendirikan sekolah untuk orang pribumi. Karena ada protes seperti ini maka dibuat perubahan yang perlu dan diumumkan pada tanggal 29 Oktober 1915. Dua perubahan yang terpenting dari aturan baru itu yakni: *pertama*, aturan itu dikeluarkan “atas nama Sri Ratu” (jadi bukan dari Gubernur Jenderal seperti aturan sebelumnya); *kedua*, pergantian rekanan dari pihak misi: Jesuit diganti oleh SVD. Pemerintah juga berkomitmen untuk tidak membuka sekolah negeri sejauh kerja *missie* dan *zending* dinilai sukses.⁵⁵

Jelaslah bahwa sesudah protes itu, tidak ada perubahan yang signifikan. *Flores-Sumba Contract* tahun 1915 tetap memberi keleluasaan kepada *missie* dan *zending* untuk membuka sekolah dengan subsidi dari pemerintah. Ada dua jenis subsidi. *Pertama*, subsidi untuk pembangunan sekolah baru dan gaji para guru. Setiap pengadaan bangunan sekolah dan penyediaan segala fasilitas awal yang diperlukan akan disubsidi setinggi-tingginya 300 gulden. *Kedua*, subsidi tahunan. Setiap tahun setiap sekolah diberi subsidi sebesar 100 gulden untuk gaji guru dan keperluan lainnya seperti ongkos pemeliharaan, perbaikan/penambahan perabot sekolah, penyediaan alat tulis-menulis, dll. Pengeluaran yang melebihi jumlah yang telah ditentukan akan dikembalikan oleh pemerintah atas dasar alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada waktu itu, ada dua jenis sekolah dasar: Sekolah Rakyat (masa studi 3 tahun) dan Sekolah Standar (masa studi 2 tahun). Sayangnya, kontrak ini hanya berjalan selama satu dekade. Dalam perkembangan, melihat misi juga bergerak di Timor dan Sumba, maka peraturan ini dicabut pada tahun 1925. Terlepas dari asumsi bahwa pemerintah tidak terlalu menganggap Flores, Timor dan Sumba penting untuk diperhatikan dari dekat, yang jelas kebijakan ini mempunyai dampak besar bagi kemajuan pendidikan di wilayah ini.⁵⁶

Sampai dengan tahun 1949 jumlah guru untuk Sekolah Rakyat mencapai 600 orang, murid 53.445 orang, jumlah umat Katolik sebanyak 30.410 jiwa. Salah satu unsur penting pendukung perkembangan sekolah ini adalah kejelasan struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan sekolah dari tingkat vikariat sampai di tingkat paroki. Strukturnya sebagai berikut: Vikaris Apostolik bertindak sebagai penguasa tunggal, dibantu oleh seorang Inspektur Misi yang melakukan inspeksi teratur ke sekolah-sekolah sebelum diinspeksi oleh pejabat pemerintah. Pada tingkat dekenat dan paroki, vikaris apostolik dibantu oleh para deken dan pastor paroki dengan pelimpahan wewenang dalam batas-batas tertentu.⁵⁷

Pada tahun 1973, jumlah Sekolah Dasar (fusi Sekolah Rakyat dan Sekolah Standar dengan masa studi 6 tahun) dan Menengah untuk Flores dan Timor mencapai 1348 buah dengan jumlah murid sebanyak 108.445 orang. Sesudah tamat Sekolah Menengah Pertama umumnya orang kesulitan untuk melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA; sekarang SMU) karena sekolah setingkat itu hanya ada di pulau Jawa, Sulawesi dan Kupang.⁵⁸ Karena itu, pada tahun 1953, SVD membuka SMA pertama di Flores dan diberi nama SMAK Syuradikara (Syuradikara artinya:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁵⁶ Hendrik Djawa, “Bidang Pendidikan...,” hlm. 89, 90; bdk. Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 306.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 91-92.

⁵⁸ Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 173, 176, 177, 180. Sekolah Menengah pertama di Flores didirikan pada tahun 1926 dengan nama pertama *Schakelscool* bertempat di Ndao, Ende. Sesudah Indonesia merdeka, namanya diganti menjadi Sekolah Menengah Pertama. Sesudah itu berturut-turut didirikan SMP-SMP lain di beberapa tempat seperti: Ruteng (1950), Boawae (1951), dan Weetebula (1952), semuanya dikelola oleh misi. Sampai dengan tahun 1956, Vikariat Apostolik Endeh sudah memiliki 21 SMP dengan 2.487 siswa, belum terhitung SMP Seminari Mataloko, Hokeng dan Kisol. Sementara itu, Sekolah Menengah Atas yang pertama untuk seluruh NTT didirikan di Kupang pada tahun 1950, diikuti Syuradikara (1953), SMAK St. Gabriel Maumere (1963), SMAK Ki Hadjar Dewantara Bajawa (1964), SMA Takari Ruteng (1966) yang berganti nama menjadi SMA Swadaya tahun 1967 dan kemudian menjadi SMA Negeri 1 Ruteng tahun 1978.

pencipta pahlawan utama).⁵⁹ Selanjutnya SVD juga membuka SGB (Sekolah Guru Bawah) di Mataloko tahun 1950. Sampai tahun 1954 misi menangani 6 SGB yaitu di Larantuka, Maumere, Jopu, Ndonga, Boawae, dan Ruteng. Pemerintah sendiri mendirikan 3 SGB di Waiwerang, Nita, dan Ende. Pada tahun 1961 SGB ditutup. SGA (Sekolah Guru Atas) di Mataloko dimulai oleh P. Frans Cornelissen tahun 1951 yang kemudian diserahkan kepada para frater BHK tahun 1952 dan karena itu SGA pun berpindah tempat ke Ndao, Ende. Pada akhir tahun 1960-an sudah ada 10 SGA di Flores. Nama SGA kemudian diganti dengan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) pada tahun 1968.⁶⁰

Selain sekolah-sekolah ini, sudah sejak awal (tahun 1933) SVD juga berpikir untuk membuka sekolah-sekolah kejuruan. Ide ini terwujud pertama kali tahun 1946 dengan dibukanya Sekolah Pertukangan di Larantuka dan Ende, menyusul pembukaan jenis sekolah yang sama di Witihama (Adonara), Mukun dan Ruteng. Pada tahun 1960-an, di bidang pertanian, dikembangkan sekolah-sekolah seperti Sekolah Usaha Tani (SUT) di Borong dan Mano (Manggarai), Boawae (Ngada), Waigete (Sikka), Lewotala (Flores Timur), dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Boawae (Ngada). Sekolah-sekolah ini kemudian ditutup karena kekurangan siswa.⁶¹

SUT Boawae yang kemudian menjadi Lembaga Pendidikan Usaha Tani (LPUT) di Boawae didirikan pada tahun 1965. Tiga tahun sesudah itu, didirikanlah Sekolah Pertanian Menengah Atas di tempat yang sama, tepatnya 29 Januari 1968. Inilah satu-satunya SPMA di NTT yang kemudian berganti nama menjadi SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan). Sekolah ini didukung oleh Keuskupan Agung Ende melalui Yayasan IPP (Ikatan Petani Pancasila), lembaga bantuan CEBEMO di Belanda, pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten Ngada, juga kementerian pertanian Republik Indonesia. Bidang studi yang dipelajari adalah: pertanian, pengairan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sekolah ini akhirnya ditutup, mungkin tahun 2000, sekali lagi karena kekurangan siswa, kurangnya dana, tenaga guru dan pendamping profesional, dan kurangnya sarana untuk praktek entah di kelas, laboratorium maupun di lapangan. Di atas bekas SPMA ini sekarang para imam projo Keuskupan Agung Ende mengelola satu SMK yang berpelindungan St. Isidorus.⁶²

Khusus untuk anak-anak puteri, jasa para biarawati sangat besar. Terhitung sejak awal sudah ada yang disebut dengan nama Kursus Rumah Tangga (KRT) yang kemudian dikembangkan menjadi Sekolah Rumah Tangga (SRT). Sekolah-sekolah ini dibuka di Larantuka, Ndonga, Mataloko dan Ruteng. Pada tahun 1947, Sekolah Kepandaian Gadis (SKG) yang pertama di Flores dimulai di Larantuka atas inisiatif para suster SSpS di Balela. Pada tahun 1952, SKG berubah nama menjadi SKP (Sekolah Kepandaian Puteri). Karena itu, sesudah Larantuka, SKP juga dibuka di Lela dan Ruteng. Jejak SSpS diikuti oleh Kongregasi CIJ yang mendirikan SKP di Ende, Jopu, dan Waerana (Manggarai). Setelah menamatkan SKP, para siswa bisa melanjutkan ke Sekolah Guru Kepandaian Puteri (SGKP). Tamatan SGKP bisa menjadi guru di SKP dan juga sekolah-sekolah umum lainnya seperti SMP dan SD. Pada tahun 1955, SKP berubah nama menjadi SKKP (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama) dan SGKP menjadi SKKA (Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas). SSpS berhasil mendirikan 1 SGKP/SKKA di Maumere, sedangkan CIJ mendirikan satu di Ende. Sekolah-sekolah ini kemudian ditutup sebagai dampak dari munculnya kurikulum baru pemerintah Tahun 1975. Di bidang kesehatan, pada tahun 1952, para suster SSpS memulai pendidikan tenaga paramedis di Lela, Sikka. Sekolah ini melewati berbagai tahap. Tahap pertama hanya berupa pendidikan untuk

⁵⁹ Untuk Syuradikara, baca Maria Matildis Banda, (*et. al.*), *Pahlawan Utama Dalam Cakrawala Menjadi. Kenangan Pesta Emas SMUK Syuradikara 1953-2003*, Ende: SMUK Syuradikara, tt.

⁶⁰ Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 187, 188-189.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 199, 201.

⁶² *Ibid.*, hlm. 202, 204-205.

pembantu para perawat dan bidan. Baru pada tahun 1980 dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Lela yang masih tetap ada sampai sekarang.⁶³

Berkaitan dengan jenjang perguruan tinggi, pada tahun 1950-an sudah ada pembicaraan awal mengenai hal itu. SVD dan para uskup Nusa Tenggara pernah berencana untuk membuka Fakultas Bahasa Indonesia dan Fakultas Pertanian. Waktu itu, tenaga dosen untuk bidang pertanian sudah ada yaitu P. Dr. Ir. Jan van Doormal SVD, P. Ir. B. Baack SVD dan P. Jan Loeters SVD. Rencana ini akhirnya batal karena tidak mendapat izin dari pemerintah. Sesudah rencana pertama ini gagal, muncul satu rencana lain tanggal 27 Oktober 1958. Kali ini diprakarsai oleh pimpinan SVD, uskup Ende dan uskup Larantuka. Isi rencananya adalah memulai fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia di Flores. Rencana ini sekali lagi gagal karena ditentang oleh penguasa militer di Singaraja hanya karena belum memiliki izin dari pemerintah. Pada tahun yang sama juga, dibuka kursus B1 Bahasa Indonesia, dipimpin oleh P. Karel van Trier. Kursus ini pun harus ditutup persis dua minggu sesudah didirikan. Pada tahun 1961, semua kursus B1 ditutup, termasuk kursus B1 Pendidikan yang sudah dimulai di Ende tahun 1954.⁶⁴

STKIP Ruteng yang kita kenal sekarang, dimulai dengan status sebagai satu tempat kursus yang disebut dengan nama Kursus Pendidikan Katekis (11 Nopember 1959) yang pada tanggal 1 Februari 1969 ditingkatkan menjadi satu akademi dengan nama Akademi Pendidikan Katekis (APK). Statusnya sebagai satu sekolah tinggi baru dimulai tahun 1986 dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Program sarjana (S1) dimulai tahun 1991 dan pada tahun 1995, ditambah lagi satu program studi yaitu Pendidikan Bahasa dan Seni. STKIP Ruteng berdiri dengan misi utama untuk menyiapkan tenaga-tenaga katekis yang bermutu namun selama ini tamatannya biasa juga bekerja sebagai guru sekolah, politisi, PNS atau pegawai swasta. Tokoh pendidik terkenal di Provinsi SVD Ruteng adalah P. Jan van Roosmalen SVD.

Pada 10 Nopember 1962, dalam kerja sama dengan 5 pemerintah daerah tingkat II di Flores, SVD memulai satu perguruan tinggi di Ende, dengan nama: *Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang Cabang Kupang di Ende*. Dekannya adalah P. Lambert Lame Uran SVD. Disebut kerjasama tetapi dalam kenyataannya SVD lebih banyak berperan dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pada tahun-tahun awal perjalanannya. Tanggal 24 Mei 1968 institut ini berubah nama menjadi *Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Nusa Cendana Cabang Kupang di Ende*. IKIP di Ende itu memiliki dua program studi yaitu keguruan dan ilmu pendidikan. Sekolah tinggi ini ditutup pada tahun 1982, setelah beroperasi selama 20 tahun dan diganti dengan Universitas Flores yang dikelola oleh YAPERTIF (Yayasan Perguruan Tinggi Flores).⁶⁵

Salah satu sumbangan penting lain dari SVD di bidang pendidikan adalah pendirian Universitas Widya Mandira Kupang (Widya Mandira = Pura Kebijaksanaan). Ide awal untuk membuka satu universitas Katolik di Nusa Tenggara dicetuskan oleh P. Henry Heekeren SVD, mantan Pemimpin Umum SVD sejagat (1977-1988). Antara tahun 1980-1981, dari diskusi yang berkembang, calon universitas itu direncanakan untuk dibangun di Maumere. Kemudian ada yang menganjurkan agar dibangun di Surabaya. Dan terakhir, diputuskan untuk dibangun di Kupang. Pemilik universitas ini adalah: 8 uskup Nusa Tenggara, 4 provinsi SVD Indonesia, dan 11 orang awam. Setelah melalui berbagai proses yang dituntut, akhirnya universitas ini resmi memulai perkuliahannya pada tanggal 6 September 1982 dengan Rektor pertamanya adalah P. Herman Embuiru SVD.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*, hlm. 199, 200, 207-208.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 209, 211.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 212-214, 257-259.

⁶⁶ Lukas Jua, "Peranan Henry Heekeren, SVD dalam Perkembangan SVD Indonesia," dalam Antonio Camnahas dan Otto Gusti Madung, (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 159-161, 166-168.

Pengabdian SVD di bidang pendidikan bukan tanpa tantangan. Sesudah masa kemerdekaan, tersiarlah satu isu miring di kalangan masyarakat terhadap misi, terutama kepada orang-orang asing, yang dicap memonopoli pendidikan formal dengan kebudayaan Katolik yang berbau Barat. Masalah ini berlangsung cukup lama dan diselesaikan pada tahun 1952. Pada tanggal 5 Juli 1952, diadakan pertemuan antara Pemerintah Daerah Flores dan misi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjernihkan masalah *Flores-Soemba Contract*, sekalipun aturan itu sudah berakhir sejak tahun 1925. Pihak misi diwakili oleh Mgr. A. Thijssen SVD dan P. J. B. Schouten SJ (setingkat petugas KWI). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa urusan persekolahan Katolik di Flores selanjutnya akan ditangani oleh satu yayasan yang berbadan hukum. Yayasan itu diakui oleh pemerintah sebagai pengganti Pengurus Tunggal Sekolah Katolik Flores. Inilah yang melahirkan Yayasan Vedapura (Vedapura = benteng ilmu) pada tanggal 25 Januari 1955. Yang baru dari kesepakatan ini yaitu keterlibatan orang-orang awam dalam kepengurusan yayasan. Ketua pertama dari yayasan ini adalah Bapak Petrus Nyo. Selanjutnya di tiap daerah tingkat II dibentuk cabang yayasan yang dipimpin seorang ketua. Karena itu muncul akronim atau singkatan seperti KETJAVE (Kepada Tjabang Vedapura), WPS (Wakil Pengurus Sekolah) dan KVS (Kepala Vedapura Setempat). P. Yan Swinkels SVD diangkat menjadi inspektur sekolah. Ketika Flores dimekarkan menjadi 5 kabupaten, perwakilan atau Vedapura setempat dirasa tidak cocok lagi. Karena itu kelima perwakilan Vedapura setempat ditingkatkan menjadi yayasan-yayasan otonom. Kelima yayasan itu diberi nama: Yayasan Persekolahan Umat Katolik, disingkat masing-masing dengan nama: SUKMA (Mangarai), YASUKDA (Ngada), YASUKEL (Ende), SANPUKAT (Sikka), dan YAPERSUKTIM (Flores Timur). Yayasan-yayasan ini tidak memiliki sumber dana sendiri karena itu sangat bergantung dari subsidi pemerintah dan sumbangan umat. Term “umat Katolik” yang disematkan dalam nama yayasan-yayasan itu memang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada umat Katolik bahwa mereka mesti turut bertanggung-jawab terhadap jatuh-bangun dan mati-hidupnya sekolah-sekolah Katolik di tempatnya masing-masing. Ini menjadi sumber kritik terhadap pengurus yayasan, bahkan ada yang menganjurkan pembukaan sekolah negeri yang pasti akan disubsidi secara tetap oleh pemerintah, daripada mengelola sekolah swasta dengan banyak tuntutan dan kekurangannya.⁶⁷

Pendidikan non-formal dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok putra dan putri. Para bruder menangani kelompok putra lewat pastoral asrama dan kursus-kursus pertukangan. Kursus-kursus pertukangan yang terkenal adalah kursus pertukangan di Larantuka dan Kursus Pertukangan St. Yosef di Ende. Kursus-kursus ini telah menghasilkan banyak tukang kayu, tukang besi, tukang batu, tukang sepatu dan tukang jahit yang tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Kelompok puteri ditangani oleh para suster SSpS. Kepada mereka diberi kursus Ketrampilan Rumah Tangga (KRT) seperti memasak, menjahit dan menyulam, disertai pendidikan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik yang beriman dan tahu mengembangkan ekonomi keluarga.⁶⁸

SVD pernah mendirikan satu SD berbahasa Belanda tahun 1925 dan ditutup saat pecah perang Pasifik tahun 1943. Sampai sekarang, Provinsi SVD Ende mengelola sekolah-sekolah berikut: *pertama*, STFK Ledalero, yang menyelenggarakan pendidikan sarjana penuh S1 untuk para calon imam dan awam sejak 1984 sampai sekarang. Pada tahun 2002, Ledalero menambah satu program studi lagi yaitu S2 di bidang teologi. *Kedua*, SMUK Syuradikara di Ende. Sekolah ini didirikan tahun 1953 dan sampai sekarang berkembang menjadi satu sekolah unggul di NTT. *Ketiga*, STM Bina Karya Larantuka, yang diambil-alih dari Keuskupan Larantuka tahun 1985. Ketiga sekolah ini bernaung di bawah Yayasan Persekolahan St. Paulus (YASSPA).⁶⁹

⁶⁷ Hendrik Djawa, “Bidang Pendidikan...,” hlm. 95, 96, 98.

⁶⁸ L. Lame Uran, *Op. Cit.*, hlm. 180; bdk. Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 206.

⁶⁹ Hendrik Djawa, “Bidang Pendidikan...,” hlm. 107; bdk. Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 257; bdk. “Laporan Provinsial SVD Ende (P. Leo Kleden SVD),” *Op. Cit.*, hlm. 8.

Kendatipun ada banyak tantangan, SVD tetap eksis di bidang pendidikan sampai sekarang. SVD tidak seperti pemerintah kolonial dengan politik etisnya yang membuka sekolah dengan *hidden agenda* tertentu. Sekolah-sekolah SVD betul dimaksudkan untuk memajukan umat dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain itu, lewat sekolah landasan bagi pembangunan diletakkan. Dengan tahu baca-tulis dan memahami Bahasa Indonesia, orang bisa menangkap siaran radio/televisi dan membaca berbagai publikasi dan dengan itu bisa belajar secara otodidak banyak hal lain yang tidak sempat diajarkan di sekolah.

4.4. Pengembangan Aspek sosial-Ekonomi Umat

4.4.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan taraf hidup sosial-ekonomi umat Katolik di Nusa Tenggara, P. Bernard Lucas SVD pernah menyusun satu konsep dasar pada tahun 1933. Yang menarik adalah konsep itu memasukkan tiga bidang garapan utama yang integral yaitu pertanian, pertukangan dan perdagangan. Sayangnya, beliau sendiri tidak sempat merealisasikan konsepnya itu karena ajal menjemputnya terlalu cepat yaitu setahun sesudah itu (1934). Pikiran tentang soal ini seakan terkubur cukup lama selama hampir dua dekade.⁷⁰

Sesudah itu, pada awal tahun 1950-an, Mgr. Wilhelmus van Bekkum SVD (uskup Ruteng dari 1951-1972) menemui pimpinan KASKI (*Katholiek Sociaal Kerkelyk Instituut*) di den Haag Belanda menjajagi kemungkinan menjadikan Manggarai sebagai basis pengembangan sosial ekonomi umat. Permintaan ini diterima bahkan wilayah cakupannya diperluas untuk seluruh Flores. Selanjutnya, P. Dr. Anton van den Ende, SVD ditugaskan membuat survei dan hasilnya dituangkan dalam satu rancangan yang disebut "*Concept Flores' Welvaartsplan*" (CFW = rancangan rencana pengembangan Flores). Rencana ini juga ternyata tidak bisa direalisasikan karena kekalutan politik waktu itu (mungkin soal kemerdekaan Indonesia?) dan tidak adanya satu lembaga pelaksana yang beranggotakan kaum awam.⁷¹

Baru pada periode 1960-an, impian Bernard Lucas SVD di atas coba diimplementasikan sebagiannya. Hal ini terjadi karena ada beberapa peristiwa pendukung, antara lain: *pertama*, gema dari Konsili Vatikan II dan beberapa ensiklik sosial yang menegaskan pengembangan aspek sosial-ekonomi umat sebagai bagian integral dari karya pastoral. Dokumen-dokumen yang berbicara tentang hal ini misalnya *Gaudium et Spes* dari Konsili Vatikan II, *Mater et Magistra* (Yohanes XXIII) dan *Populorum Progressio* (Paulus VI). *Kedua*, pembentukan hirarki gereja Katolik Indonesia tahun 1961 menuntut kemandirian umat di bidang ekonomi. Karena itu di setiap keuskupan ditetapkan seorang *Delegatus Socialis* (= Delsos) yang bekerja purna waktu. *Ketiga*, adanya jaminan bantuan berkesinambungan dari *Misereor*, lembaga donor para uskup Jerman Barat.⁷²

Karena itu, pada bulan Juni-Juli 1963, beberapa ahli dari Jerman melakukan survei di Flores dan Timor untuk merancang rencana pengembangan sosial-ekonomi umat berbasis data dan fakta di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam "*Flores-Timor Plan*" (FTP). Dalam FTP para uskup Nusa Tenggara bekerjasama dengan Misereor (lembaga Aksi Puasa umat Katolik Jerman Barat), Missio Aachen, Pemerintah Jerman Barat, SVD dan SSsP. Dalam rancangannya, FTP merencanakan

⁷⁰ B. J. Baack, SVD, "Karya SVD di Flores dalam Bidang Sosial Ekonomi," dalam Hendrik Djawa, Marcel Beding, John Dami Mukese, (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁷¹ Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 198.

⁷² B. J. Baack, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 150.

pelaksanaan 357 proyek yang dibagi atas 7 bidang, yaitu: (1) Pertanian dan Perikanan, (2) Pertukangan dan Industri Rumah Tangga, (3) Perumahan, (4) Kesehatan dan Karya Sosial Karitatif, (5) Pendidikan Formal dan non-Formal, (6) Transportasi dan Komunikasi, (7) Organisasi dan Kaderisasi.⁷³

Untuk mengimplementasikan rencana-rencana FTP, dibentuklah satu Dewan Sosial-Ekonomi (*sozial-ekonomischer Ausschuss*) sebagai pembina, yang beranggotakan para uskup, pimpinan SVD dan SSpS, dan wakil dari IPP (Ikatan Petani Pancasila). Selain itu, dibentuk pula satu Biro Pelaksana (*Geschäft stelle*) bertempat di Ende di bawah pimpinan P. Dr. Ir. Jan C. van Doormal SVD. Biro ini kemudian dipindahkan ke Nita, Kabupaten Sikka, dan berganti nama menjadi LPPS/NTT (Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial).

4.4.2. Realisasi Rencana FTP

Hal-hal yang dibuat dalam kaitan dengan bidang pertanian adalah pengadaan alat-alat kerja, introduksi berbagai jenis bibit unggul, pupuk dan obat-obatan anti hama. Dalam kaitan dengan itu, diusahakan juga pembangunan irigasi di berbagai tempat. Usaha yang lebih besar tampak dalam irigasi persawahan di Zaä (Ngada) atas inisiatif P. Hubertus Hermens SVD. Irigasi Zaä diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur NTT, El Tari (1966-1978), tanggal 13 September 1969. Selain Zaä, usaha persawahan juga dibuat di Soä (Ngada) oleh P. Mommersteeg dan di Lembor (Manggarai) oleh P. Schaaf. Dalam proyek-proyek itu, masyarakat diajak untuk meninggalkan pola bertani lahan kering dan beralih ke persawahan. Ajakan itu berhasil karena bagi mereka yang ingin bersawah disediakan rumah tinggal dan lahan sawah lengkap dengan sertifikat dari pemerintah. Semua itu dibuat atas biaya dari misi. Dalam kaitan dengan pengembangan persawahan ini juga dibuka sekolah-sekolah pertanian seperti sudah dijelaskan di poin 4.3. di atas.⁷⁴

Di bidang perikanan, misi menyadari bahwa laut sebagai sumber protein belum dieksploitasi secara maksimal karena berbagai kekurangan di pihak para nelayan. Karena itu, misi memberikan kursus kepada para nelayan, misalnya di Sikka, dan juga menyiapkan berbagai peralatan yang diperlukan untuk menangkap ikan seperti pukat dan motor tempel.⁷⁵

Di bidang perumahan rakyat, misi mulai dengan sekolah pertukangan. Sekolah-sekolah ini difasilitasi dengan berbagai alat dan mesin yang diperlukan. Mereka yang selesai sekolah diberi perkakas sesuai dengan keahliannya baik sebagai tukang kayu maupun sebagai tukang besi. Mereka ini yang kemudian berperan penting sebagai tukang yang bisa membangun rumah-rumah sehat untuk anggota masyarakat yang membutuhkan. Industri rumah tangga seperti tenun ikat, pembakaran batu bata dan usaha genting disokong dengan alat dan dana yang diambil sebagai pinjaman. Untuk membantu masyarakat membangun rumah sehat, disediakan pinjaman untuk bisa membeli bahan-bahan non-lokal. Untuk urusan-urusan ini, dibentuklah koperasi-koperasi simpan pinjam demi memudahkan masyarakat mendapatkan dana tetapi sekaligus melatih masyarakat untuk tahu menggunakan uang.⁷⁶

Berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pada tahun 1927, Gereja membangun rumah sakit pertama di kabupaten Sikka yaitu rumah sakit Lela. Tahun 1928, seorang dokter dari Jerman didatangkan oleh misi atas inisiatif Mgr. Verstraelen SVD, namun hanya mampu melayani masyarakat terdekat. Dokter itu bernama Tietze. Sudah pasti, masyarakat yang tinggal jauh dari Lela tidak mendapatkan

⁷³ Eduard Jebarus, *Loc. Cit.*

⁷⁴ B. J. Baack, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 151.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

pelayanan kesehatan secara efisien. Karena itu, dengan bantuan FTP bisa dibangun 20-an poliklinik dan beberapa BKIA. Beberapa poliklinik itu kemudian dikembangkan menjadi Puskesmas oleh pemerintah. Selain itu, FTP juga menjalankan proyek penyediaan air bersih dengan pipanisasi atau penggalian sumur, menyelenggarakan penyuluhan higiene, gizi dan pemanfaatan bahan makanan yang ada serta pemberian gizi tambahan kepada anak-anak balita. Untuk pelayanan sosial, FTP juga pernah menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam (gempa bumi, banjir, kelaparan karena kekeringan). Bantuan yang diberikan biasanya dalam bentuk “*food for work*”. Artinya orang diberi makanan dengan maksud supaya dia punya tenaga untuk selanjutnya bisa bekerja lagi mencari nafkah untuk menghidupi dirinya.⁷⁷

Selain sekolah pertanian seperti sudah dijelaskan di atas, FTP juga memberikan bantuan finansial untuk beberapa sekolah lainnya. Di samping itu, diselenggarakan juga kursus-kursus seperti: kursus motivasi/penyadaran, kursus rumah tangga, kursus gizi, kursus koperasi kredit, kursus ekonomi rumah tangga yang mengajarkan orang untuk mengurus ekonomi rumah tangga dan untuk menabung.⁷⁸

Dalam rangka membuka isolasi transportasi, masyarakat difasilitasi dengan sekop, pacul, linggis, pikhowel untuk memperbaiki jalan. Mengingat transportasi darat belum berfungsi baik, maka transportasi laut diutamakan. Untuk itu, FTP mendatangkan beberapa motor tempel yang bisa dibeli oleh masyarakat secara kredit. Dalam kaitan dengan urusan pelayaran ini, dibangunlah dermaga Larantuka dan Maumbawa. Dermaga terakhir ini dibangun atas usaha P. Hubertus Hermens SVD untuk membuka isolasi wilayah Ngada Tengah. Di tempat itu juga disiapkan 4 bak air minum yang menyediakan air bagi kapal-kapal yang berlabuh di situ.⁷⁹

Dalam sejarah misinya SVD pernah memiliki armada bahari dengan kapal-kapalnya adalah: perahu Santa Maria, KM Arnoldus I, II dan III (1932-1949), KM Santa Theresia (1946-1971), KM Sitti Nirmala (1955-1975), KM AMA (1971-?), KM Stella Maris (1959-?) dan KM Ratu Rosari (1964-1990-an?). Namun pelayanan di bidang pelayaran ini sempat terhenti, ketika pada tahun 1958, pemerintah Indonesia rezim Orde Lama memonopoli semua jalur pelayaran di Indonesia. Atas usaha dari Mgr. A. Thijssen SVD, kapal misi bisa beroperasi kembali. KM Stella Maris dan KM Ratu Rosari pun berhasil didatangkan. Dengan demikian, jalur transportasi laut Nusa Tenggara-Surabaya bisa dihidupkan kembali setelah kapal pemerintah kolonial Belanda berhenti beroperasi. Kapal-kapal misi yang disebutkan ini dioperasikan untuk melayani kepentingan umum lewat pengangkutan barang dan penumpang.⁸⁰

FTP ternyata tidak hanya bergerak dalam soal memberi bantuan langsung tetapi juga dalam urusan kaderisasi dan pembentukan organisasi masyarakat. Untuk kaderisasi, beasiswa disiapkan dalam rangka menyiapkan tenaga terampil di bidang tertentu. Selain itu, FTP juga berusaha untuk mengorganisir masyarakat ke dalam berbagai kelompok karya sesuai dengan profesinya seperti ikatan-ikatan Pancasila untuk petani, buruh, nelayan dan paramedis. Semua ini adalah organisasi milik kaum awam. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, semua organisasi karya ini digabungkan ke dalam satu organisasi saja yaitu Golongan Karya. Akibatnya, kegiatan organisasi-organisasi yang sudah terbentuk itu tidak terorganisir dengan baik dan perlahan-lahan hilang.⁸¹

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 152; L. Lame Uran, *Op. Cit.*, hlm. 186-187.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 155;

⁸⁰ Alex Beding, “Dari Arnoldus Hingga Ratu Rosari,” *Manuskrip*, Larantuka, September 2012, hlm. 21.

⁸¹ B. J. Baack, SVD, *Loc. Cit.*

4.5. Dialog antar Agama dan Gerakan Ekumene

Seperti sudah disebutkan di bagian konteks dari tulisan ini (lihat poin 2), urusan dialog antar agama, merupakan salah satu dimensi khas misi Gereja dewasa ini. SVD sangat aktif dalam soal ini, jauh sebelum Konsili Vatikan II. Ketika armada misi giat menyinggahi pantai-pantai di Nusa Tenggara ini, tidak semua petugas di pelabuhan beragama Katolik. Di pelabuhan Ende, misalnya, kepala bongkar-muat pada waktu itu adalah seorang muslim yang bernama Haji Mansur Puandelu. Dalam kisah awal pembangunan gedung SMAK Syuradikara dan gedung-gedung SVD lainnya, bapak Haji Mansur ini sangat berjasa. Dia sangat jujur dalam kerjasamanya dengan Br. Fransiskus yang selalu bertugas sebagai pembangun gedung. Tugas utama bapak haji ini adalah menghitung dengan teliti ketersediaan bahan-bahan bangunan dalam gudang penyimpanan. Selama peletakan batu pertama sampai pembangunan gedung SMAK Syuradikara dirampungkan, Bapak Haji Mansur terlihat selalu hadir bersama bruder dan para pekerja yang lain di lokasi kerja.⁸²

Selain kerjasama dengan Haji Mansur, usaha lain di bidang dialog antar agama ini juga tampak dalam penerimaan siswa-siswi beragama lain ke dalam sekolah-sekolah yang dikelola SVD. Syuradikara dan STM Bina Karya Larantuka menerima bukan hanya siswa-siswi yang beragama Katolik tetapi juga mereka yang beragama lain seperti Islam, Protestan dan lain-lain. STFK Ledalero sendiri sudah 16 tahun membangun dialog dengan Pesantren Walisanga Ende, bermula dari tahun 1997, ketika Fr. Leonardus Gade (sekarang misionaris di Brazil) ditempatkan di sana sebagai seorang frater praktek. Sampai sekarang, selalu saja ada frater tertentu yang dikirim ke sekolah Islam itu untuk menjalankan masa prakteknya.⁸³

Relasi dengan pihak Protestan sendiri dimulai secara serius ketika kebijakan pertukaran dosen dan mahasiswa antara STFK Ledalero dan ATK Kupang terjadi di tahun 1976. Dosen pertama Ledalero yang mengajar di ATK Kupang adalah P. Henry Heekeren SVD yang kemudian menjadi Superior Jeneral SVD (1977-1988). Sebelum pertukaran ini terjadi, rasa curiga di antara kedua penganut gereja sangat tinggi. Hal ini terjadi sebagai warisan dari konflik Katolik-Protestan di Eropa yang diperkuat di Indonesia dengan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda. Beberapa tahun terakhir, pertukaran ini belum dijalankan karena satu-dua kendala kecil.⁸⁴

4.6. Perjuangan Menegakkan Keadilan dan Perdamaian Lewat JPIC

Dalam Kapitel Provinsi SVD Ende di Hokeng (1988), disepakati satu resolusi tentang keterlibatan SVD se-provinsi dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Sesudah itu dibentuklah Komisi Keadilan dan Perdamaian. Ide ini mengemuka bukan karena kehendak satu-dua orang SVD semata, tetapi karena salah satu aspek misi dewasa ini adalah perjuangan menegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.

Beberapa anggota SVD Provinsi Ende mempunyai komitmen kuat untuk memperhatikan dan membantu yang miskin dan yang terpinggirkan, perempuan, petani, pengungsi, para korban bencana alam dan kekerasan, para korban perdagangan manusia (*human trafficking*), dan mereka yang sulit mendapat pelayanan publik. Untuk menjawab pelbagai kebutuhan pelayanan dalam bidang JPIC, dibentuklah aneka divisi dalam provinsi. Untuk saat ini, perhatian lebih diarahkan pada keutuhan lingkungan, membantu yang miskin, membela perkara di pengadilan, investigasi-analisa-

⁸² Maria Matildis Banda, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁸³ Data ini diketahui dari pembicaraan lisan dengan P. Kanis Bhila SVD, Kepala Sekolah SMUK Syuradikara Ende dari 27 September 2007 sampai 30 April 2011. Data tentang kerjasama dengan pesantren diketahui penulis karena tugas sebagai seorang pendamping frater (= prefek) di Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero.

⁸⁴ Lukas Jua, *Op. Cit.*, hlm. 123-126.

dokumentasi, bantuan-bantuan darurat bagi para korban. Para pastor di Candraditya, para frater dan dosen Ledalero berperan aktif di TRuK-F (Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores) dalam kerjasama dengan para suster SSpS dan kaum awam untuk menolong para pengungsi, membantu korban karena kekerasan dan menemani yang tertindas.⁸⁵

4.7. Beberapa Karya Lain

Patut diakui juga bahwa sebagian dari para misionaris SVD tempo dulu memang memiliki sikap yang melihat kebudayaan asli sebagai praktik penyembahan berhala yang harus diperangi. Namun ada beberapa di antara mereka dikenang sebagai pencatat dan perekam budaya yang saat ini sangat berguna bagi upaya pelestarian. Beberapa nama yang bisa disebutkan, antara lain: P. Yulius Verheijen, P. Bernard Vroklage, P. Paul Arndt, P. H. Bader, P. Theodor Verhoeven, P. Adolf Bulger, P. Frans Cornelissen, P. Johannes Kersten, P. Johannes Tol, P. Karel van Trier, P. Wilco Wolterboer, P. Yosef Glinka, P. Petrus Sareng Orinbao (P. Pit Petu SVD) dan Mgr. Wilhem van Bekhum SVD.⁸⁶ Sampai sekarang SVD provinsi Ende memiliki satu lembaga penelitian agama dan kebudayaan yang diberi nama Candraditya. Lembaga yang didirikan 18 November 1987 ini diharapkan untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh para peneliti SVD di zaman dulu.

SVD juga memiliki beberapa misionaris yang mencintai musik liturgi dan bekerja keras untuk mengembangkan musik liturgi gerejani di wilayah ini. Orang-orang yang berperan penting di bidang ini, di antaranya: Pastor Cornelis Does di Bajawa dan P. Vincent Lechovic di Timor, P. P. Heerkens, P. Pe Rozing.⁸⁷ Generasi yang muncul lebih kemudian bisa disebutkan nama-nama seperti P. Anton Sigoama Letor, P. Daniel Kiti, P. Petrus Wani, dan lain-lain. Dewasa ini, SVD memiliki satu sanggar yang berpusat di Ledalero yakni Sanggar Musik Arnoldus (SMAr). Sanggar ini diharapkan melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu di bidang musik liturgi.

Pada tahun 1926, didirikan Percetakan sederhana di Ende dengan nama Percetakan Arnoldus untuk menunjang kehidupan material misi, tetapi juga dan yang terpenting adalah sebagai sarana pewartaan Sabda. Percetakan sebagai sarana pewartaan Sabda masih tetap dipertahankan sampai sekarang, dengan tata urut cetak sebagai berikut: Kitab Suci, Katekese, buku-buku rohani, buku-buku sekolah, buku-buku/bacaan umum, dan barang cetakan lainnya. Percetakan ini didukung oleh Penerbit Nusa Indah yang didirikan pada tahun 1970.⁸⁸

Dalam bidang media massa pernah ada majalah-majalah seperti “Kristoes Ratoe Itang”, “Bintang Timur,” “Bentara”, “Anak Bentara”, dan “Pandu Pendidikan”. Kemudian muncul mingguan DIAN dan KUNANG-KUNANG. Sejak 9 September 1999 sampai sekarang (2013), Flores Pos diterbitkan sebagai satu harian yang tersebar dan dibaca di seluruh Flores. SVD juga pernah bergerak di bidang perfilman. Untuk maksud ini, pemimpin SVD di kepulauan Sunda Kecil pada tahun 1928 mengirim dua orang misionarisnya, P. Simon Buis dan P. Beltjens untuk mempelajari teknik pembuatan film di New York. Keduanya juga sempat magang di Hollywood. Usaha ini membuahkan hasil dalam wujud dua film yaitu Ria Rago dan Amorira, yang boleh jadi merupakan dua film pertama yang dibuat di wilayah ini mengenai orang-orang Nusa Tenggara.

Selain karya-karya di atas, SVD juga memiliki Pusat Pembinaan Hidup Rohani di antaranya: rumah retret “Kemah Tabor” di Mataloko yang sampai sekarang masih di kelola oleh P. Konrad Bard dan di

⁸⁵ Laporan Provinsial SVD Ende (P. Leo Kleden, SVD) kepada Superior General pada *workshop* untuk para superior, Juni-Juli 2011.

⁸⁶ Kurt Piskaty dan Joannes Riberu, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Eduard Jebarus, *Op. Cit.*, hlm. 267-269.

Boanio yang dirintis oleh P. Josef Wiese. Di rumah-rumah ret-ret ini biasa diberi pembinaan rohani untuk para pastor, guru-guru (agama), anggota PNS (Pegawai Negeri Sipil), anak-anak sekolah dan anggota masyarakat lainnya.

Fokus perhatian Provinsi SVD Ende sekarang adalah pastoral parokial; sekolah dan pendidikan formal; formasi calon imam dan bruder; pers, penerbitan dan komunikasi; perjuangan untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan; dan kerasulan untuk kaum muda. Khusus untuk kerasulan kaum muda, yang dibuat sampai sekarang adalah pastoral asrama mengingat sampai sekarang SMUK Syuradikara dan STM Bina Karya Larantuka mempunyai asrama untuk siswa-siswinya. Selain itu, retreat yang diberikan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa bisa dihitung sebagai satu karya pastoral. Karya pastoral ini masih perlu diperluas dan ditingkatkan di masa mendatang, misalnya lewat pastoral mahasiswa. Sampai sekarang SVD belum cukup berbuat di bidang ini sebagai Serikat.⁸⁹

5. Kegagalan-kegagalan SVD

5.1. Misi Sumba: SVD Pergi (1929-1955) untuk Kembali (1984-sekarang)

SVD memulai misi di Sumba secara tetap pada tanggal 25 Agustus 1929. Namun sebelum itu, SVD sudah melakukan kunjungan-kunjungan berkala selama dua tahun antara tahun 1927-1929. P. H. Limbrock adalah misionaris pertama yang mendirikan stasi SVD di sana setelah ditinggalkan Jesuit 18 Nopember 1898. Pada bulan Oktober 1929 didirikanlah satu pastoran sederhana di Weetebula (*Wee*= air, *tebula*= membual) di atas tanah misi seluas 10 ha pemberian raja Laora yang bernama Tako Geli. Pesta Natal 25 Desember 1929 adalah pesta natal pertama untuk umat Sumba setelah 31 tahun tanpa imam di sana. P. H. Limbrock adalah orang yang memiliki bakat di bidang musik, fotografi dan geologi. Dia dikenang sampai sekarang di Sumba sebagai orang pertama yang menemukan “batu putih Sumba” sebagai bahan bangunan yang ampuh. Hal ini diperkuat oleh penyelidikan yang dibuat oleh Institut Geologi Bandung. Gereja Katedral Sumba sekarang dibangun seluruhnya dari “batu putih Sumba” itu.⁹⁰

Weetebula dipilih sebagai tempat pertama SVD bukan tanpa alasan. Ada beberapa pertimbangan yang mendukung Weetebula sebagai pusat misi SVD, yaitu: *pertama*, Weetebula adalah “zona netral” akibat perang antara Waijewa dan Laora. *Kedua*, Weetebula agak jauh dari zending (1 km jaraknya) yang pada tahun 1913 telah mendirikan stasi di Tenggoo/Karuni. *Ketiga*, Weetebula terletak di antara tiga kerajaan besar di Sumba (Laora, Waijewa dan Kodi). *Keempat*, Weetebula kaya batu putih.⁹¹

Sesudah bekerja selama hampir 26 tahun di Sumba SVD memilih pergi dari sana. Kepergian ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Sebenarnya sudah agak lama SVD ingin meninggalkan Sumba. Terhitung sejak sebelum Perang Dunia II, sudah sebanyak dua kali Asisten Regional P. G. van Velzen, SVD menyampaikan gagasan penyerahan itu kepada Mgr. Henricus Leven SVD.⁹² Isu ini dilupakan begitu saja karena perang. Pada tahun 1947, dalam Kapitel Regional di Todabelu (Ngada,

⁸⁹ “Laporan Provinsial SVD Ende (P. Leo Kleden SVD) untuk Kapitularis Provinsi SVD Ende XXI , *Op. Cit.*, hlm. 8-9. 11.

⁹⁰ Y. Lukas CSsR, *Sejarah Gereja Katolik di Sumba dan Sumbawa*, Ende: Percetakan Offset Arnoldus, tt., hlm. 13, 24, 25.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Mgr. Henricus Leven SVD juga sempat mendirikan satu kongregasi pribumi pertama di Flores yang diberinya nama CIJ (*Congregatio Imitationis Jesu*). Kongregasi yang didirikan pada tanggal 15 Maret 1935 ini sekarang berkarya di berbagai tempat di Indonesia bahkan di mancanegara seperti Italia. Cf. P. Alex Beding SVD, *Mgr. Henricus Leven, SVD: Profil Seorang Uskup-Misionaris*, Ende: Sekretariat Provinsi SVD Ende, 1996, hlm. 77.

Flores), isu pengalihan Sumba ke kongregasi lain diangkat lagi. Namun para kapitularis menolak usulan itu dengan perbandingan suara yang cukup signifikan (13 suara tidak setuju, 5 setuju dan 1 blanko). Kendatipun demikian, laporan tentang hal itu tetap diteruskan ke Kapitel Jeneral SVD VII di Roma (22 September-21 Oktober 1947) yang akhirnya menerima usulan agar Sumba diserahkan kepada kongregasi lain.⁹³

Ada beberapa alasan yang dikemukakan: *pertama*, SVD dan Vikaris Apostolik Sunda Kecil takut bentrok dengan pemerintah dan zending; *kedua*, SVD tidak bisa memberi perhatian yang diperlukan; *ketiga*, SVD tidak berbuat cukup untuk misi Sumba sehingga banyak kesempatan baik tidak bisa dimanfaatkan. Ada kesan kuat bahwa Sumba ditelantarkan dari segi tenaga misionaris dan dana dibandingkan dengan Flores dan Timor.

Akhirnya, setelah penantian panjang selama 8 tahun (1947-1955), pada tanggal 23 Juni 1955, terbitlah surat keputusan dari Propaganda Fide bahwa misi Sumba-Sumbawa diserahkan kepada *Congregatio Sanctissimi Redemptoris* (= Serikat Sang Penebus Mahakudus), disingkat CSsR, dari Provinsi Köln, Jerman. Mereka biasa disapa dengan sebutan Redemptoris. Misionaris-misionaris SVD pun mulai secara bertahap meninggalkan Sumba, mulai dari P. Van Vessem dan P. Donkers, menyusul P. Piet de Zwart, P. M. Krol, Br. Arnoldus Streng, P. G. Mezenberg dan P. K. Kale Bale. P. A. de Rechter masih sempat bertahan di Weetebula untuk membantu para misionaris redemptoris. Dia meninggalkan Sumba 5 Februari 1958.⁹⁴

Kendatipun demikian, Sumba tidak ditinggalkan selamanya oleh SVD. Setelah 27 tahun berkarya, Redemptoris sendiri mengalami kekurangan tenaga misionaris. Redemptoris pun meminta bantuan kepada SVD. Permintaan itu disetujui oleh Superior General SVD tanggal 1 Maret 1984. Pastor pertama yang kembali ke sana adalah P. Yan Djuang Somi SVD (menerima tugas sebagai pastor paroki Raba/Bima), diikuti berturut-turut oleh P. Thomas Thepo (Pastor paroki Sumbawa Besar), P. Zenon Stezycki, P. Yoseph Banamtuan, P. Vincent Jolasa (ex) yang melayani paroki Melolo mulai akhir tahun 1985. Pada tahun 1986, Provinsial SVD Ruteng, P. Kherubim Pareira, diangkat menjadi uskup Weetebula. Beliau bertugas sebagai uskup di sana sampai tahun 2008. Dari situ dia dipindahkan ke keuskupan Maumere dan masih bertugas sampai sekarang.⁹⁵

4.2. Perkawinan di Flores: Antara Hukum Gerejani dan Adat Istiadat Setempat

Dalam uraian tentang pastoral parokial dan strategi pastoral gaya SVD (lihat poin 4.1.) ditegaskan bahwa perkawinan adat masih cukup kuat di Flores. Hal ini diakui atau ditegaskan oleh Karel Steenbrink dalam kesimpulannya tentang strategi pastoral perkawinan versi SVD.

Dalam tulisannya dia mengemukakan bahwa perdebatan tentang perkawinan adat masih terus berlangsung sampai sekarang. Menyangkut soal ini, masih terdapat perbedaan persepsi antara para klerus dan umat kebanyakan di Flores. Orang Flores melihat perkawinan sebagai perkawinan di antara kedua mempelai dan di antara kedua keluarga besar. Tidak jarang urusan adat didahulukan daripada urusan berkat nikah di Gereja. Berkat gerejani sangat sering terjadi jauh lebih kemudian daripada urusan adat. Steenbrink mengangkat hal ini sebagai bukti bahwa Gereja tidak pernah berhasil menegakkan secara penuh gagasan dan peraturan nikah Katolik kepada umat Flores. Apakah

⁹³ H. Haripranata SJ, *Ceritera Sejarah Gereja Katolik Sumba dan Sumbawa*, Ende: Percetakan Offset Arnoldus, 1984, hlm. 383-384.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 387. Bdk. Buku Kenangan 25 Tahun Propinsi SVD Ruteng, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

⁹⁵ *Ibid.*

persoalan ini adalah persoalan khas Flores ataukah persoalan Gereja Indonesia pada umumnya? Mudah-mudahan ini hanya persoalan umat Katolik di Flores.⁹⁶

4.3. *Apostolat di bidang Politik*

Para misionaris SVD memang berhasil mendirikan banyak organisasi rohani. Yang kurang berhasil ditangani adalah organisasi-organisasi sosial politik sekular. Kurang berhasil dalam arti apa? SVD tidak membuat pastoral khusus untuk menyiapkan kader-kader politik bangsa. Pada tahun 1926 sudah ada organisasi *Katholieke Kleine Soenda Bond* (KKSBB) artinya Paguyuban Katolik Sunda Kecil yang terbanyak anggotanya adalah para guru. Namun organisasi ini akhirnya tidak bertahan hidup, mungkin karena kurang mendapat sokongan, tidak diberi bimbingan politik, dan sebagainya. Nasib yang sama juga menimpa PPKD (*Pakempalan Politiek Katholiek Djawi*). PPKD yang mulanya hanya untuk orang-orang Katolik di Jawa, dalam perkembangan diperluas untuk seluruh Indonesia. PPKD lalu diubah menjadi PPKI (*Pakempalan Politiek Katholiek Indonesia*). Cabang atau pun ranting dari PPKI di Sunda Kecil pada umumnya dan Flores pada khususnya tidak tampak, bahkan tidak terdengar apa pun tentang organisasi politik ini.⁹⁷

4.4. *Flores-Timor Plan (FTP): Sukses atau Gagal?*

Patut diakui bahwa FTP telah memberkati Flores (dan Timor?) dengan banyak proyeknya. Namun jelas juga bahwa kesuksesan ini bukanlah kesuksesan SVD semata. Kalau mau disebut sukses, maka ini adalah kesuksesan banyak pihak, mulai dari para uskup Nusa Tenggara yang waktu itu semuanya dari SVD, para donatur, sampai kepada umat yang dilibatkan dalam proyek besar ini.

Lambert Lame Uran SVD menilai bahwa dari keseluruhan proyek FTP (dan juga misi SVD; *tambahan dari penulis*) sekolah kejuruan tidak cukup baik dikembangkan dan jumlahnya juga sangat terbatas. Karena itu terbatas pula jumlah anggota masyarakat yang bisa hidup lebih baik, lebih sehat dan berkecukupan pangan dan sandangnya. Sampai sekarang masih banyak masyarakat NTT miskin dan terbelakang. Selanjutnya Lame Uran menyatakan bahwa realitas ini menunjukkan bahwa Gereja dan pemerintah gagal dalam bidang pendidikan. Ternyata sekolah belum berhasil memperbaiki taraf hidup masyarakat Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur.⁹⁸ Pernyataan Lambert Lame Uran ini ada benarnya.

Satu hal lain yang mesti diangkat yaitu, FTP merupakan satu proyek besar tetapi datangnya dari “atas”, bukan dari “bawah”. Artinya, masyarakat penerima proyek-proyek FTP lebih banyak ditempatkan sebagai objek daripada subjek. Dalam satu dua kasus memang sempat dibuat kursus-kursus pemberdayaan (*empowering*) dalam soal kewirausahaan, koperasi kredit, pengembangan ekonomi rumah tangga, namun rupanya tidak sempat diintensifkan. Para petugas FTP sendiri mensinyalir bahwa persoalan utamanya ada beberapa poin yaitu: *brain drain* (banyak tenaga ahli yang dididik di luar Flores tidak pernah kembali untuk membangun tanah airnya), kurangnya semangat kerja tangan, kekurangan pemimpin yang mau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan pengaruh adat lewat tua-tua adatnya yang menyebabkan masyarakat tidak berkembang. Selain itu, ada kesan kuat tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan misi; masing-masing berjalan di jalurnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa satu-satunya kerjasama yang efektif antara pemerintah dan Gereja hanya terjadi pada masa pemerintahan kolonial. Hal itu tampak dalam realisasi kebijakan *Flores-Sumba Contract/Regeling*.⁹⁹

⁹⁶ Karel Steenbrink, *Op. Cit.*, hlm. 255-256.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 242.

⁹⁸ L. Lame Uran, *Op. Cit.*, hlm. 180.

⁹⁹ B. J. Baack SVD, *Op. Cit.*, hlm. 158.

6. Pernik-pernik Hikmah dari Pembelajaran Sejarah SVD Indonesia

Pertama, misi itu sungguh misi Allah sendiri, bukan misi serikat, Gereja atau manusia siapa pun. Allah adalah tuan dari misi, sedangkan kita yang lain adalah para pekerja di ladang misi Allah. Pada masa Perang Dunia I, ketika tidak ada harapan lagi bahwa misi Sunda Kecil bisa mendapat *supply* tenaga misionaris baru (karena perang dan penyakit mematikan), Allah bekerja di tengah situasi sulit itu. Kedatangan 25 tenaga misionaris Togo dan Mosambik karena terusir dari wilayah kerja mereka bisa dilihat sebagai “misteri karya Tuhan sendiri” untuk kepentingan misi di Sunda Kecil.

Pada waktu Perang Dunia II, misi Sunda Kecil terkena pukulan hebat. Tanpa diduga sebelumnya, Allah “mengutus” dua orang uskup dan dua imam dari musuh perang Belanda sendiri, Jepang, untuk datang membantu Gereja dan karya pastoral di masa sulit itu. Berkat Tuhan yang lain, tampak dalam taahbis imam perdana Ledalero dan satu-dua angkatan berikutnya, antara tahun 1941-1945. Yang dibutuhkan dari seorang misionaris dalam situasi sulit adalah “iman yang teguh.” Hal ini dipraktikkan dengan sangat baik oleh Mgr. Leven dan P. Bouma.

Kedua, peran sentral *Manuale Pastorale* 1939 bagi para misionaris SVD. Mengapa dokumen ini penting? Menurut saya, karena dihasilkan dari satu pertemuan bersama, bukan hanya dibuat sekali saja tetapi beberapa kali. Tidak heran bila isi buku itu diterima hampir oleh semua misionaris. Keputusan dan kesepakatan di buku itu dilihat sebagai tata laksana kerja yang mengikat semua orang dan dilaksanakan dengan baik. Karena itu, *Manuale Pastorale* dinilai berhasil meningkatkan mutu karya pastoral para misionaris pada masa itu.

Aspek sejarah ini mengajarkan bahwa karya misi/pastoral yang baik harus direncanakan bersama secara matang. Rencana itu bersifat mengikat semua orang dan mesti dilaksanakan. Jumlah rapat-rapat kita banyak sekali, seperti sinode, musyawarah pastoral, kapitel, dll, tetapi sesudah itu hasilnya tetap tinggal di atas kertas. Pertanyaan untuk kita adalah mengapa hasil rapat-rapat seperti itu tidak berhasil dibuat di lapangan atau tidak dilaksanakan? Mungkin hasil rapat-rapat itu diperoleh terlalu cepat, tanpa melewati pertimbangan-pertimbangan yang serius.

Ketiga, *Flores-Sumba Contract/Regeling dan persekolahan*. Kebijakan ini mengajarkan bahwa jika antara pemerintah dan gereja atau pengelola pendidikan di berbagai tingkat terjalin kerjasama yang baik maka pendidikan akan maju. Ulah rezim Orde Baru yang main ganti kurikulum terus dari waktu ke waktu ternyata telah cukup sering menyulitkan sekolah-sekolah swasta. Para pengelola sekolah tentu saja tidak hanya mengurus soal transfer ilmu tetapi juga mengolah budi pekerti peserta didik. Urusan mengubah mentalitas orang tidak gampang, butuh waktu lama dan banyak pengorbanan. Kerja yang demikian rumit tetapi penting untuk satu bangsa, perlu didukung oleh pemerintah, bukan malah dipersulit dengan berbagai aturan yang terkesan dibuat-buat. Hal lain yang kita petik dari sejarah persekolahan di Flores adalah sekolah kejuruan tetap penting dari waktu ke waktu. Sejak dulu sampai sekarang, SVD masih kurang memperhatikan sekolah jenis ini. Ini bisa menjadi salah satu aspek dari pastoral kategorial SVD di masa depan.

Keempat, *Flores-Timor Plan (FTP)*. Proyek ini mengajarkan bahwa aspek sosial ekonomi umat sangat penting untuk diperhatikan dalam karya pastoral. Kalau dulu SVD tidak mengembangkan aspek ini, pasti umat sekarang sudah lupa akan kehadiran SVD. Kendatipun demikian, perlu dicatat juga bahwa FTP tidak berhasil seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program yang datang “dari atas” tidak selalu berhasil. Dulu FTP punya banyak proyek tetapi nyatanya masyarakat NTT masih tergolong miskin sampai sekarang. Selain itu, penyebab kurang berhasilnya FTP juga adalah soal mental “kerja keras” masyarakat kita yang masih lemah. Contoh nyata, dari sejarah diketahui

bahwa setelah tamat SPMA, orang tidak ke kebun tetapi ke kantor untuk cari kerja. Sekolah ini terpaksa ditutup, salah satu sebabnya adalah karena tidak banyak orang yang suka bercocok tanam setelah sekolah. Bukankah orang menempuh pendidikan dengan maksud untuk bisa bekerja secara profesional? Profesi seorang tamatan sekolah pertanian bukan mengurus administrasi perkantoran tetapi mengolah tanah.

Kelima, makna pengiriman misionaris SVD ke luar negeri. Hakikat gereja itu misioner. Itu berarti bermisi merupakan satu kewajiban bagi orang beriman. Dengan kata lain, kabar gembira yang kita terima, janganlah kita tahan untuk diri kita sendiri tetapi mesti disebarluaskan. Pilihan SVD untuk bermisi keluar negeri sangat sesuai dengan hakikat gereja. Apalagi jumlah imam projo di kawasan ini lumayan banyak. Apa salahnya jika SVD mengembangkan sayapnya ke luar negeri?

Keenam, tidak semua orang SVD sukses. Sejarah SVD jarang mencatat hal-hal negatif. Hasil pembelajaran saya terhadap sejarah SVD seperti tertuang dalam tulisan ini bisa menggambarkan secara jelas gaya bersejarah *ala* SVD. Sikap SVD ini manusiawi dan bisa dipahami. Siapakah yang rela membuka kedok kekurangannya sendiri kepada orang lain? Kendatipun demikian, jika orang ingin menempatkan sejarah sebagai satu ilmu untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran mengenai hidup, maka hal-hal yang kurang baik pun semestinya dicatat. Orang akan belajar lebih banyak, justru dari kegagalan dan kekurangan, ketimbang dari keberhasilan dan kesuksesan.

Tidak semua orang SVD sukses artinya tidak semua mereka bergelut di berbagai bidang karya yang disebut sebagai keberhasilan karya SVD. Umumnya karya tertentu yang ditangani oleh misionaris tertentu bermula dari kemampuan misionaris itu sendiri untuk melihat kebutuhan nyata dan mengambil inisiatif untuk memulai karya itu. Selain itu, kemampuan melihat panggilan Allah untuk memulai satu tugas juga cukup berperan penting. P. Hubertus Hermens SVD penggagas persawahan di Zaä (Ngada), berhasil membaca realitas kemiskinan sebagai panggilan Allah bagi dirinya untuk mengubah cara bertani dari lahan kering ke persawahan. Dengan itu masyarakat bisa berkecukupan pangannya. Diceritakan bahwa setiap kali merayakan ekaristi, P. Hermens selalu mendoakan orang-orang kecil dan juga mendoakan proyeknya itu agar berhasil. Saking seringnya dia mendoakan intensi seperti itu sampai ada umat yang merasa bosan dengan intensi yang itu-itu juga.¹⁰⁰

Ketujuh, kegagalan SVD di Sumba dan beberapa bidang karya. Kegagalan-kegagalan ini mengajarkan kepada SVD bahwa mereka mesti lebih setia dalam kata dan perbuatan; lebih terbuka untuk membangun dialog-kritis dengan agama asli terutama dalam kaitan dengan masalah perkawinan; dan lebih jeli lagi dalam membaca kebutuhan nyata umat, yang dalam kesehariannya bukan hanya hidup sebagai orang Katolik tetapi juga sebagai warga Negara dengan segala kompleksitas permasalahannya.

7. Retrospeksi Historis Untuk Perjalanan SVD di Masa Depan

Pada kesempatan perayaan sentenial usia SVD Indonesia ini, saya ingin mengangkat dua peristiwa sejarah sebagai sarana pembelajaran. *Pertama*, tafsiran Arnold Janssen terhadap peristiwa *kulturkampf*; dan *kedua*, peristiwa *internering* (= pengasingan) para misionaris SVD di Flores oleh penguasa militer Jepang tahun 1942.

Peristiwa pertama, *kulturkampf*. Ketika *kulturkampf* sedang berkecamuk, Arnold Janssen menemui Uskup Agung Paulus Melchers dari Köln dan mengutarakan niatnya untuk mendirikan satu Rumah

¹⁰⁰ Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wilhelmina Anu (usia 55 tahun), dalam seminar sehari dalam rangka 100 tahun SVD di Kemah Tabor Mataloko, 3 Mei 2013.

Misi. Sang uskup memandangnya dengan sangat serius dan berkata, “Kita hidup dalam satu zaman di mana segala-galanya goyah dan sepertinya akan runtuh, lalu sekarang Anda datang dan mau mulai dengan sesuatu yang baru?”¹⁰¹ Arnold Janssen menimpali dengan satu jawaban yang rupanya tidak pernah terlintas dalam bayangan uskup itu sebelumnya. Arnold menjawab demikian, “Kita hidup dalam satu zaman, di mana banyak yang berantakan, maka untuk itu harus didirikan yang lain, yang baru!”¹⁰²

Dalam peristiwa *kulturkampf*, Alnold Janssen, dengan mata dan telinga imannya, berhasil melihat dan mendengar Allah yang sedang berbicara. Allah memintanya untuk berbuat sesuatu. Ketika semua orang cemas dan kebingungan tidak tahu harus berbuat apa karena segala sesuatu (material dan imaterial) hancur berantakan, Arnold Janssen justru berbicara tentang memulai sesuatu yang baru. Yang baru itu adalah mendirikan satu rumah misi yang akan mengutus misionaris ke luar negeri.

Kalau peristiwa ini ditafsirkan dan dihubungkan dengan nama SVD (Serikat Sabda Allah) maka sesungguhnya serikat yang diabdikan kepada “Sabda Allah” ini boleh dikatakan dipersepsi oleh Arnold Janssen untuk pertama kalinya dari peristiwa *kulturkampf* itu. Allah yang “ditemuinya” dalam *kulturkampf* itu dialaminya sebagai Allah yang sedang bersabda. Karena itu, frase Sabda Allah yang disematkan pada nama Serikat Sabda Allah mesti dimengerti jauh lebih luas daripada sekedar mewajibkan seluruh anggota serikat untuk membaca Kitab Suci setiap hari. Sabda Allah itu lebih luas daripada Kitab Suci, bahkan Sabda itu sudah ada sebelum Kitab Suci ada. Kebenaran ini dapat kita temukan dalam teks injil Yohanes 1:1 yang berbunyi: “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.”

Tafsiran yang kedua dari peristiwa *kulturkampf* yaitu ketika terjadi peristiwa yang sangat sulit dalam hidup (umat) manusia, Allah hadir di sana dan menyampaikan sesuatu. Hanya orang yang memiliki mata dan telinga iman seperti Arnold Janssen-lah yang bisa melihat dan mendengar seruan Allah dari dalam peristiwa seperti itu.

Peristiwa kedua, *internering* para misionaris SVD di Flores oleh penguasa militer Jepang tahun 1942. Ada satu momen penting dalam detik-detik yang menegangkan itu. Alex Beding dalam bukunya *Solidaritas Benteng Iman* (Ledalero, 2012) menggambarkan momen itu secara indah, demikian:

*Sesudah makan siang mereka semua berkumpul dalam kapela, di mana P. Regional Bouma menyampaikan sebuah pesan untuk meneguhkan hati. Dan setelah melagukan Ave maris stella mereka berpamit. Mgr. Leven merasa tidak kuat untuk berbicara karena amat terharu. Untuk kemuliaan nama Tuhan para misionaris itu siap meninggalkan Flores. Sebagai kenangan beliau memberikan kepada masing-masingnya sebuah rosario dengan salib yang diberkatinya dengan indulgensi genap. Setelah itu Mgr. Leven melepaspergikan misionaris-misionaris, para pembantunya itu ke tempat yang tidak diketahui, untuk suatu jangka waktu yang juga tidak diketahui. Dengan berlinang air mata monsinyur mengundurkan diri ke dalam kapel. In nomine Domini! (Dalam nama Tuhan) ucapnya dalam hati yang gundah.*¹⁰³

¹⁰¹ Josef Alt SVD, *Journey in Faith: The Missionary Life of Arnold Janssen*, Alex Beding SVD (ed.), *Arnold Janssen: Hidup dan Karyanya*, Ende: Percetakan Arnoldus, tt, hlm. 93.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Alex Beding, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Untuk saya, frase-frase “demi kemuliaan Tuhan” dan “*In nomine Domini* (Dalam nama Tuhan)” sangat penting dalam momen itu. Frase-frase itu menggambarkan secara jelas siapa Mgr. Leven dalam momen sesulit itu: betapa Mgr. Leven percaya penuh kepada Tuhan! Sejarah mencatat bahwa imannya ternyata bukan sekedar bertepuk sebelah tangan. Tuhan mendengarkan doanya. Kedatangan Mgr. Yamaguchi dan ketiga temannya menjadi tanda jawaban Tuhan atas doanya. Kemudian, kembalinya para misionaris setelah masa tiga tahun, boleh dilihat juga sebagai satu *providentia Dei* (penyelenggaraan Allah).

Apa artinya menjadi seorang SVD 50 atau 100 tahun ke depan? Kedua peristiwa sejarah di atas bisa memberi jawaban atas pertanyaan ini. *Pertama*, Sabda Allah itu sangat sentral bagi hidup seorang SVD. Tetapi Sabda Allah itu mesti dipahami dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi tekstual yaitu Sabda Allah seperti tertulis dalam Kitab Suci. Dimensi kedua yaitu dimensi kontekstual yang boleh disebut dengan nama “Sabda Allah Kehidupan.” Peristiwa *kulturkampf* mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa “bersabda” lewat peristiwa-peristiwa hidup manusia, terutama lewat peristiwa-peristiwa sulit. Karena itu, yang namanya Sabda Allah itu tidak hanya ditemukan dalam Kitab Suci tekstual. Dengan demikian, jati diri seorang SVD ke depan mesti tampak dalam kemampuan merenungkan firman-Nya seperti tertulis di dalam Kitab Suci, tetapi juga kemampuan menangkap kehendak Tuhan yang terjelma lewat berbagai peristiwa hidup dan tanda-tanda zaman, baik yang berdampak personal maupun komunal. Dua dimensi Sabda ini tidak boleh dipisahkan dari hidup seorang SVD. Hanya dengan demikian, SVD akan bisa hidup lebih dinamis di masa depan. *Kedua*, dalam situasi-situasi sulit seorang misionaris mesti tetap teguh dalam iman kepada Allah. Perilaku Mgr. Leven dan P. Bouma dalam peristiwa *internering* di atas menjadi contoh yang tak terbantahkan.

8. Penutup

Dari semua uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam perjalanan sejarah setiap peristiwa punya muatan positif dan negatif sekaligus; ada sisi gelap dan terangnya. Kebenaran lain yang tak terbantahkan yaitu tampilnya tokoh-tokoh yang menekuni karya tertentu yang menjawab kebutuhan dan perkembangan hidup masyarakat. Jelaslah bahwa tidak semua orang SVD terlibat dalam urusan pengembangan sosial ekonomi umat, demikian juga dengan musik liturgi, media komunikasi massa dan sebagainya. Kesimpulan yang bisa ditarik dari fakta-fakta sejarah ini yakni bahwa setiap orang mesti berjuang bekerja sesuai dengan tuntutan zamannya. Untuk itu dibutuhkan kreativitas untuk melihat karya mana yang paling menjawab kebutuhan umat. Namun lebih dari itu, kemampuan spiritual untuk melihat Tuhan yang senantiasa bersabda lewat berbagai peristiwa hidup. Selain itu, perlu diinsafi pula bahwa karya misi pada prinsipnya selalu merupakan karya Tuhan. Karena itu, setiap rencana kerja seorang misionaris bahkan seluruh hidupnya mesti selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Tanpa Tuhan, semua yang dikerjakan sangat mungkin tidak akan berhasil. Tanpa Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa disebut misionaris.

Di usianya yang ke-100 tahun ini, SVD Indonesia sudah terbagi ke dalam 4 provinsi, yaitu: Provinsi SVD Ende, Provinsi SVD Timor, Provinsi SVD Ruteng dan Provinsi SVD Jawa. Wilayah kerja Provinsi SVD Ende adalah: Lembata, Solor, Adonara, Flores Timur, Sikka, Ende, Bajawa, Maluku, dan Papua Barat. Anggota provinsi SVD Timor bekerja di Timor Barat dan Sabu. Wilayah kerja para anggota provinsi Ruteng yakni Manggarai dan Sumba. Provinsi SVD Jawa melayani umat di beberapa tempat di pulau-pulau seperti Bali, Lombok, Jawa, Sumatera, Nias, Batam dan Kalimantan. *...ut sermo Domini currat et glorificetur...* (= supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan; II Tes 3:1).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Cf. *Catalogus 2013*, Romae: Apud Curiam Generalitiam SVD, 2013, hlm. 254-271. 274-281. 282-289, 294-307.